

ISBN : 978-602-5553-37-0

EKONOMI DAERAH



Sri Muljaningsih
Ignatia Martha Hendrati
Mohammad Wahed

ISBN 978-602-5553-37-0



Penerbit : Mitra Sumber Rejeki

BAB I

PENDAHULUAN

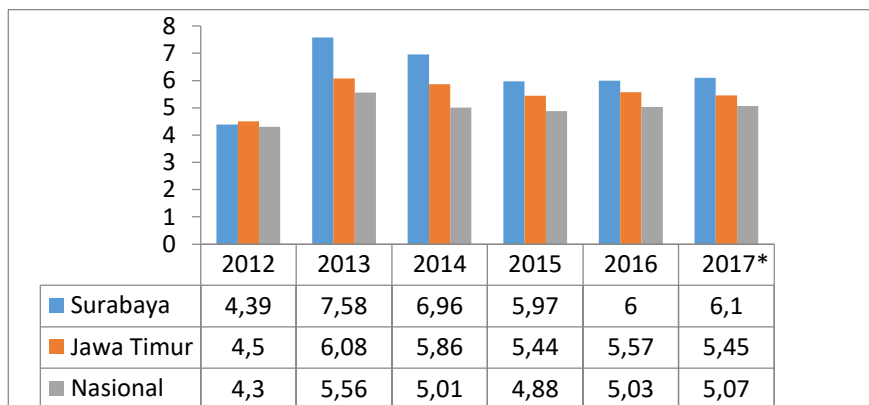
1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan wilayah merupakan bagian dari perencanaan nasional yang diamanahkan dalam UU 25 tahun 2004 mengenai system Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara umum, perencanaan pembangunan di Indonesia yang kemudian dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah terbagi menjadi perencanaan sektoral dan spasial. Perencanaan pembangunan ini meliputi seluruh aspek tidak terkecuali di bidang penanaman modal.

Penanaman modal menurut Pasal 1 angka 4 UU Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang positif. Tujuan dari pembangunan itu sendiri secara keseluruhan adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut maka prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan ekonomi, karena diharapkan keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dapat digunakan untuk mendorong pembangunan di bidang lainnya.

Untuk mengolah potensi ekonomi potensial menjadi riil salah satu sarana yang sangat penting adalah pengembangan investasi, karena dengan pengembangan investasi akan mendorong pada beberapa efek mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan nasional/daerah maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan ekonomi daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya peningkatan investasi; baik di bidang ekonomi maupun di bidang lainnya.

Dengan segala potensi, fasilitas, dan sumber daya daerah yang dimilikinya, maka pertumbuhan dan perkembangan aktifitas penanaman modal di Kota Surabaya sangat terbuka lebar. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kota ini belum mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada level yang terus tumbuh. Selengkapannya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Laju pertumbuhan ekonomi ini kedepan diharapkan terus meningkat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian diperlukan upaya-upaya untuk mendatangkan investor sehingga perekonomian dapat terus tumbuh pada tingkat yang optimal.



Sumber : BPS Kota Surabaya, 2018 *) angka sementara

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Salah satu upaya dalam memberikan gambaran akan peluang Investasi di Kota Surabaya adalah dengan menyediakan informasi tentang apa saja yang tersedia di Kota Surabaya baik Prasarana, Sarana maupun Kebijakan pendukung investasi. Dalam mendukung kebijakan Dalam menentukan potensi sektoral pada suatu wilayah, selain didasarkan pada kajian pemetaan investasi sebagaimana yang telah dilakukan, juga diperlukan suatu analisa lebih lanjut untuk memberikan penguatan analisa secara mendalam terkait potensi investasi sebenarnya yang ada sampai dihasilkan jenis potensi unggulan wilayah, dengan harapan sesuatu yang dihasilkan dari kajian itu bisa memberikan arahan dan informasi yang akurat

dan jelas bagi para calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Surabaya. Untuk mendukung kegiatan di atas dan dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Surabaya, perlu adanya kajian terkait penyusunan peluang investasi di Surabaya sebagai pendukung terumuskannya pemetaan investasi yang dapat menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan peningkatan investasi Kota Surabaya.

BAB II

INVESTASI DAERAH

2.1 Pengertian Investasi

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Tujuan investasi adalah meningkatkan kapasitas produksi perekonomian di masa mendatang. Karena tingkat kesejahteraan rakyat, dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh pertumbuhan kapasitas produksi, maka tingkat investasi amat menentukan tingkat kesejahteraan rakyat dimasa mendatang.

Investasi umumnya dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Mesin-mesin, pabrik-pabrik dan peralatan produksi (*business fixed investment*)
2. Residensial (*residential investment*)
3. Persediaan (*inventory investment*)

Investasi dalam bentuk pabrik, mesin dan peralatan lebih dikenal sebagai investasi dalam bentuk barang modal (kapital). Investasi jenis ini amat dibutuhkan untuk menjaga agar stok barang modal per tenaga kerja tidak mengalami penurunan, yang akan menyebabkan penurunan kapasitas produksi perekonomian. Karena itu laju pertumbuhan stok barang modal (investasi) harus lebih tinggi dari laju pertumbuhan angkatan kerja dan laju depresiasi barang modal.

Investasi dalam bentuk residensial mencakup pembangunan rumah atau bangunan-bangunan yang diharapkan menghasilkan pendapatan sewa di masa mendatang. Investasi persediaan mencakup bahan baku, produk setengah jadi dan barang jadi. Investasi persediaan memiliki beberapa fungsi, seperti, memperlancar atau memperlulus manajemen produksi antar waktu, meningkat efisiensi produksi dan mencegah kehabisan stok bila terjadi peningkatan permintaan yang di luar dugaan.

Investasi merupakan keputusan rasionil, dalam arti individu atau perusahaan hanya akan melakukan investasi, bila hal tersebut menambah keuntungan. Atau dengan kata lain, investor akan menanamkan modalnya

bila biaya menambah satu unit barang modal atau investasi adalah lebih kecil dari tambahan keuntungan dari menambah satu unit investasi.

Karena investasi umumnya berorientasi jangka panjang, maka biaya dan manfaat yang dipertimbangkan para investor adalah ekspektasi biaya dan ekspektasi pendapatan. Dengan demikian kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang investasi, harus mempertimbangkan apakah kebijakan-kebijakan tersebut akan memperbaiki ekspektasi para pelaku ekonomi di masa mendatang. Umumnya kebijakan akan memperbaiki ekspektasi jangka panjang, bila sifatnya konsisten, berkesinambungan dan memperbaiki kepastian usaha, yang mencakup menurunnya risiko usaha dan membaiknya prospek pendapatan usaha.

Membaiknya perkembangan investasi, bukan saja diukur dari pertumbuhan investasi, tetapi juga dari perkembangan komposisi investasi dan perkembangan antara rencana investasi yang disetujui dengan investasi yang terealisasi. Perkembangan komposisi investasi dapat dilihat berdasarkan perkembangan investasi barang modal, residensial dan persediaan atau berdasarkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

a. Komponen Investasi

Komponen Investasi meliputi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA), Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Investasi Non PMA/PMDN serta Investasi Daerah yang spesifik dan didasarkan pada Permendagri No.52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

b. Metode Penghitungan Kinerja Investasi

Dalam perjalanan investasi, nilai suatu asset bisa berubah dari waktu ke waktu akibat perubahan kondisi pasar. Selain itu, sebagai bagian dari proses investasi, investor perlu memantau dan mengevaluasi kinerja investasi portofolionya untuk melihat sejauh mana strategi yang dipilihnya bekerja demi tercapainya tujuan investasi. Pada dasarnya, ada tiga alasan utama mengapa kita perlu mengukur kinerja investasi:

1. Kinerja investasi merupakan tujuan dari proses investasi. Dengan mengukur kinerja investasi, maka investor dapat mengukur seberapa besar pencapaian tujuan investasinya.

2. Sebagai feedback atas pencapaian tujuan investasi. Pengukuran kinerja memungkinkan investor melakukan evaluasi, di mana hasil evaluasi tersebut dapat menjadi umpan balik (feedback) atas pencapaian tujuan investasi. Dengan berbekal umpan balik ini maka investor dapat menentukan apakah strategi yang dipilihnya sudah tepat, ataukah ia masih perlu melakukan langkah-langkah penyesuaian guna mencapai tujuan investasinya.
3. Menghindari penyimpangan dari tujuan investasi. Evaluasi kinerja investasi secara berkala dapat membantu menghindari kekeliruan yang berakibat penyimpangan hasil investasi dari tujuan investasi. Jika memang terjadi kekeliruan maka investor dapat segera meluruskannya dengan mengubah strategi investasi atau menyempurnakan proses investasinya.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Investasi

Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus (2004) Investasi adalah hasil biaya investasi yang ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan mengenai masa depan. Faktor-faktor penentu investasi sangat tergantung pada situasi dimasa depan yang sulit untuk diramalkan, maka investasi merupakan komponen yang paling mudah berubah. Beberapa faktor yang mempengaruhi investasi dalam perekonomian suatu negara antara lain:

1. Pengaruh Nilai Tukar

Perubahan nilai tukar dengan investasi bersifat *uncertainty* (tidak pasti), pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.

2. Pengaruh Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi. Pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang modal atau bahan baku produksi memerlukan modal (input) lain untuk menghasilkan output / barang final.

3. Pengaruh Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Menurut Greene dan Pillanueva, tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro. Dengan demikian tingkat inflasi domestik juga berpengaruh pada investasi secara tidak langsung melalui pengaruhnya pada tingkat bunga domestik.

4. Pengaruh Infrastruktur

Banyak negara di dunia, mengundang investor guna berpartisipasi menanamkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur, seperti jalan tol, sumber energi listrik, sumber daya air, pelabuhan, dan lain-lain. Partisipasi tersebut dapat berupa pembiayaan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis, Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.

5. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah disini adalah meliputi semua pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan roda perekonomian agar berjalan lebih baik dan bersemangat. Peran pemerintah seperti dikemukakan oleh Keynes sering kali diperlukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian.

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Eduardus Tandelilin (2001), investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan

memeproleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas wakru dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut, dia menjelaskan bahwa investasi memiliki beberapa tujuan, antara lain :

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang ada agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilihan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya kerana digerogoti oleh inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

2.2 Penggolongan Investasi

Menurut Horngren (1998), penggolongan investasi dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi dalam bentuk saham, obligasi, tanah, dan bentuk lain yang dimiliki investor dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Investasi jangka panjang itu sendiri terdiri dari investasi dalam sekuritas, seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang. Investasi dalam harta tetap berwujud yang saat ini digunakan dalam spekulasi seperti tanah yang ditahan untuk spekulasi. Investasi yang disisihkan untuk dana khusus, seperti dana pelunasan, dana pensiun atau dana yang digunakan untuk perluasan pabrik, dan nilai penyerahan kas dari asuransi jiwa. Investasi dalam anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi.

b. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang dimiliki investor dalam jangka waktu yang relatif

pendek. adanya usulan-usulan investasi, estimasi arus kas dari usulan-usulan investasi, evaluasi arus kas investasi, memilih proyek-proyek yang sesuai dengan criteria tertentu, dan monitoring dan penilaian terus-menerus terhadap proyek investasi setelah investasi dilakukan.

2.3 Tipe-Tipe Investasi

Menurut Fahmi (2011), ada dua tipe investasi yang dapat dipilih yaitu :

a. Investasi Langsung

Investasi langsung (direct investment) yaitu mereka yang memiliki dana dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu asset keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara atau berbagai cara lainnya. Beberapa macam investasi langsung dirangkum sebagai berikut :

Investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan.

1) Tabungan

2) Deposito

Investasi langsung dapat diperjualbelikan.

1) Investasi langsung di pasar uang.

i. T-bill

ii. Deposito yang dapat dinegosiasikan

2) Investasi langsung di pasar modal.

a. Surat-surat berharga pendapatan tetap : T-bond, Federal agency securities, municipal bond, corporate bond, dan convertible bond.

b. Saham-saham (equity securities) : saham preferen dan saham biasa.

3) Investasi langsung di pasar turunan.

a. Opsi

b. Future contract

b. Investasi tidak Langsung

Investasi tidak langsung (indirect investment) adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau pembelian

asset keuangan cukup hanya memegang dalam bentuk saham atau obligasi saja.

2.4 Pengertian Keputusan Investasi

Keputusan investasi merupakan keputusan terpenting dari keputusan lainnya dalam hubungannya dengan peningkatan nilai perusahaan. Keputusan Investasi menurut Saragih (2008). adalah keputusan yang diambil untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dan permasalahan bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana kedalam bentuk – bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Secara singkat keputusan investasi yaitu penggunaan dana yang bersifat jangka panjang.

Keputusan investasi merupakan kekuatan penggerak utang dari setiap sistem usaha. Keputusan investasi mendukung strategi persaingan yang dikembangkan manajemen berdasarkan perencanaan untuk menjalankan dana yang ada. Helfert (1997).

Investasi adalah suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki perusahaan dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa – masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama, yaitu : investasi dalam bentuk aktiva riil dan investasi dalam bentuk surat berharga atau sekuritas. Perilaku keputusan investasi berbasis pada peluang investasi dan ketersediaan keuangan internal. Pengukuran variabel menggunakan investasi aktual, karena investasi aktual merupakan implikasi dari realisasi peluang investasi pada masa lalu (Jogiyanto, 2003).

A. Proses Keputusan Investasi

Proses keputusan investasi menurut Husnan (2004) adalah menunjukkan bagaimana investor memilih sekuritas, berapa banyak investasi tersebut, dan kapan investasi tersebut akan dilakukan. Setiap melakukan keputusan investasi selalu saja memerlukan proses. Proses tersebut akan memberikan gambaran pada setiap tahap yang akan ditempuh oleh perusahaan.

Menurut Fahmi (2011), secara umum proses manajemen investasi meliputi lima langkah berikut :

1. Menetapkan sasaran investasi.

Penetapan sasaran berarti melakukan keputusan yang bersifat fokus atau menempatkan target sasaran terhadap yang akan diinvestasikan. Penetapan sasaran investasi sangat disesuaikan dengan apa yang akan ditujukan pada investasi tersebut.

2. Membuat kebijakan investasi.

Tahap ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola dana yang berasal dari saham, obligasi, dan lainnya untuk kemudian didistribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Perhitungan pendistribusian dana ini haruslah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena berbagai hal dapat timbul pada saat dana tersebut tidak mapu untuk ditarik kembali.

3. Memilih strategi portofolio.

Ini menyangkut keputusan peranan yang akan diambil oleh pihak perusahaan, yaitu apakah bersifat aktif atau pasif saja. Pada saat perusahaan melakukan investasi aktif maka semua kondisi tentang perusahaan akan dengan cepat tergambarkan di pasar saham. Investasi aktif akan selalu mencari informasi yang tersedia dan kemudian selanjutnya mencari kombinasi portofolio yang paling tepat untuk dilaksanakan. Sementara secara pasif hanya dapat dilihat pada indeks rata-rata atau dengan perkataan lain berdasarkan reaksi pasar saja, tanpa ada sikap atraktif.

4. Memilih asset

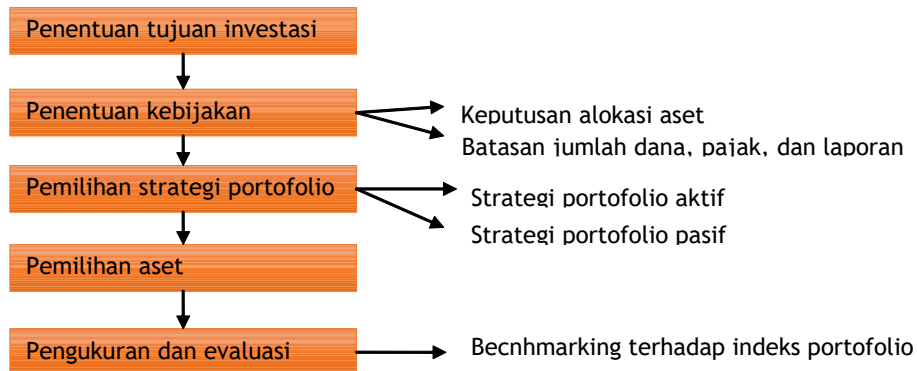
Di sini pihak perusahaan berusaha memilih asset investasi yang nantinya akan member imbal hasil yang tertinggi (maximal return). Imbal hasil di sini dilihat sebagai keuntungan yang akan mampu dipeoleh

5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja.

Tahap ini adalah menjadi tahap reevaluasi bagi perusahaan untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama ini dan apakah tindakan yang telah dilakukan selama ini telah benar-benar maksimal atau belum. Jika belum, maka sebaiknya segera

melakukan perbaikan agar kerugian tidak akan terjadi ke depan nantinya.

Berikut ini adalah gambar 2.1 yang menunjukkan kelima tahap-tahap yang ada dalam proses keputusan investasi.



Sumber : Tandelilin (2001:10)

Gambar 2.1
Proses Keputusan Investasi

B. Penilaian Investasi

Menurut Husain Umar (2005), metode penilaian investasi yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Metode Payback Period

Metode ini merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi (initial cash investment) dengan menggunakan aliran kas, dengan kata lain payback period merupakan rasio antara initial cash investment dengan cash inflow-nya yang hasilnya merupakan satuan waktu. Selanjutnya nilai rasio ini dibandingkan dengan maximum payback period yang dapat diterima.

2. Metode Internal Rate of Return

Metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas, dengan mengeluarkan investasi awal.

3. Metode Net Present Value

Net Present Value yaitu selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih (aliran kas operasional maupun aliran kas terminal) di masa yang akan datang.

4. Metode Profitability Index

Pemakaian metode profitability index ini caranya adalah dengan menghitung melalui perbandingan antara nilai sekarang dari rencana penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang dari investasi yang telah dilaksanakan.

2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi

A. Kebijakan Pendanaan

Kebijakan pendanaan merupakan keputusan perusahaan untuk memperoleh dana untuk kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dimasa yang akan datang. Perusahaan membutuhkan keputusan pendanaan yang kuat agar dapat bertahan dalam menghadapi kompetisi. Sumber dana perusahaan dapat diperoleh dari internal dan eksternal perusahaan. Pendanaan internal perusahaan berasal dari laba yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Pendanaan internal tidak dapat mendanai semua investasi perusahaan sehingga perusahaan membutuhkan dana dari pihak eksternal. Pendanaan eksternal dapat bersumber dari pinjaman bank dan portofolio.

Struktur modal merupakan komposisi pendanaan permanen perusahaan, yaitu bauran pendanaan jangka panjang perusahaan. Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan dimana struktur keuangan mencerminkan kebijakan manajemen perusahaan dalam mendanai aktivitasnya. (Sawir, 2004). Menurut Sadalia (2010), struktur modal menyatakan adanya hubungan campuran antara hutang dan modal sendiri dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan.

Rasio yang digunakan rasio utang yaitu Debt to Equity Ratio (DER), yaitu suatu perbandingan antara nilai seluruh hutang dengan total equitas. Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan guna mengetahui financial leverage perusahaan.

Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar utang jangka panjang perusahaan dibanding dengan modal sendiri yang dimiliki

perusahaan. Informasi Debt to Equity Ratio (DER) diperlukan oleh pemegang saham, apabila terdapat penurunan dalam DER menunjukkan bahwa sebagian besar investasi yang dilakukan oleh perusahaan harus didanai dari ekuitas pemegang saham . Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham (Darsono, 2007).

B. Likuiditas

Menurut Ahmad (2004) keputusan investasi yang dibuat perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan menghasilkan kas yang dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek atau yang disebut likuiditas perusahaan. Likuiditas suatu perusahaan diukur dari kemampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo. Likuiditas berkenaan dengan solvency (kesanggupan melunasi) dari posisi dalam membayar utang-utangnya.

Menurut Tampubolon (2005) likuiditas menunjukkan tingkat kemudahan relatif suatu aktiva untuk segera dikonversikan ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai serta tingkat kepastian tentang jumlah kas yang dapat diperoleh. Likuiditas menunjukkan hubungan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Rasio likuiditas yang digunakan adalah dengan menggunakan Current Ratio. Current Ratio atau rasio lancar merupakan rasio yang membagi aktiva lancar dengan aktiva kewajiban lancar . Rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban lancar yang ditutup dengan aktiva yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam jangka pendek.

Current Ratio (CR) dapat dihitung dengan rumus :

$$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

C. Profitabilitas

Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas badan usaha dalam menghasilkan laba. Menurut Tampubolon (2005) pengukuran tingkat profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat Return On Investment (ROI) yang diharapkan dengan tingkat return yang diminta para investor dalam pasar modal. Jika return yang diharapkan lebih besar daripada return yang diminta, maka investasi tersebut dikatakan

menguntungkan. Nilai pasar suatu saham sangat tergantung kepada perkiraan dari expected return dan risiko dari arus kas di masa yang akan datang. Rasio profitabilitas tergantung dari informasi akuntansi yang diambil dari laporan keuangan. Profitabilitas dalam konteks rasio untuk mengukur pendapatan menurut laporan laba rugi dengan nilai investasi. Rasio profitabilitas kemudian dapat dibandingkan dengan rasio yang sama dengan rasio korporasi lainnya pada tahun-tahun sebelumnya. Rasio profitabilitas yang biasa yang digunakan adalah Return On Investment (ROI) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan, ROI dapat dihitung dengan rumus :

$$ROI = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total aktiva}}$$

BAB III

INDIKATOR EKONOMI

3.1. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi di suatu region pada jangka waktu tertentu (setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya.

Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan di atas, termasuk pula komponen penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto. Jumlah seluruh komponen tersebut disebut Nilai Tambah Bruto (NTB) sektoral dan PDRB diperoleh dari penjumlahan NTB seluruh sektor (lapangan usaha). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

3.2. Metode Perhitungan PDRB

A. Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Berlaku dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

- **Metode Langsung** adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah. Metode langsung

akan dapat memperlihatkan karakteristik sosial ekonomi setiap daerah. Disamping itu manfaat pemakaian data daerah adalah dapat digunakan untuk menyempurnakan data statistik daerah yang lemah.

Cara penghitungan PDRB menggunakan metode langsung terdiri dari tiga pendekatan, yaitu :

1. ***Pendekatan Produksi (Production Approach)***

Pendekatan dari segi produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun dengan cara mengurangi output dari masing-masing sektor atau sub sektor dengan biaya antaranya. Pendekatan ini bisa juga disebut pendekatan nilai tambah, pendekatan nilai tambah dilakukan untuk mendapat Nilai Tambah Bruto (*Gross Value Added*) atau disingkat menjadi NTB, dengan cara mengurangkan nilai output dengan biaya antara (*Intermediate Consumption*). Yang dimaksud dengan output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di daerah tersebut dalam satu periode tertentu (biasanya satu tahun). Dan yang dimaksud dengan biaya antara (*Intermediate consumption*) adalah barang-barang tidak tahan lama (umur pemakaiannya kurang dari satu tahun atau habis dalam satu kali pemakaian) dan jasa-jasa pihak lain yang digunakan dalam proses produksi. Jadi, apabila nilai output dikurangi dengan biaya antara, maka akan diperoleh Nilai Tambah Bruto yang terdiri dari biaya faktor produksi (upah/gaji, bunga neto, sewa tanah, keuntungan), penyusutan barang modal dan pajak tak langsung neto.

Nilai output biasanya digunakan data sekunder dari instansi yang bersangkutan. Sedangkan biaya antara diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR). Penghitungan dengan pendekatan produksi ini biasanya digunakan untuk sektor pertanian, industri, gas, air minum, pertambangan dan sebagainya.

2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*),

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk dalam surplus usaha adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan ini banyak dipakai pada sektor yang produksinya berupa jasa seperti sektor pemerintahan.

3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*),

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir barang dan jasa di wilayah domestik. Jadi Produk Domestik Regional dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto tersebut. Namun demikian, dalam penyusunan Indikator Daerah Kota Surabaya tahun 2013 ini tidak menggunakan pendekatan pengeluaran mengingat data yang dimaksud tidak tersedia dalam level kabupaten/ Kota termasuk di Kota Surabaya.

Secara umum pendekatan pengeluaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melalui **pendekatan penawaran** yang terdiri dari metode arus barang dan metode penjualan eceran.
2. Metode **pendekatan permintaan** yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode data anggaran belanja, metode *balance sheet* dan metode statistik perdagangan luar negeri. Pada prinsipnya cara ini dimaksudkan untuk memperkirakan komponen-komponen permintaan akhir seperti:
 - a. Barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba) dan pemerintah.

- b. Barang dan jasa yang digunakan untuk membentuk modal tetap bruto.
- c. Barang dan jasa yang digunakan sebagai stok dan ekspor netto.

Pendekatan dengan cara ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Barang dan jasa yang diproduksi oleh unit-unit produksi akan digunakan untuk keperluan konsumsi, pembentukan modal (investasi) dan ekspor.

Barang-barang yang digunakan ini ada yang berasal dari produksi dalam daerah (domestik) dan yang berasal dari luar daerah/impor. Karena yang dihitung hanya nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi domestik saja, maka dari komponen biaya di atas perlu dikurangi dengan nilai impor sehingga komponen nilai ekspor di atas akan menjadi nilai ekspor neto. Apabila nilai konsumsi (konsumsi rumahtangga, pemerintah dan yayasan sosial), nilai pembentukan modal dan ekspor neto dijumlahkan, maka akan diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. Dalam penghitungan tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

$$PDRB = C + I + G + (X - M) \dots\dots(2.1)$$

Dimana:

C = Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga;

I = Pembentukan Modal Tetap;

G = Pengeluaran Konsumsi Pemerintah;

X = Nilai Ekspor;

M = Nilai Impor .

Kenyataannya, pengumpulan data untuk metode ini sangat sulit. Hal ini dikarenakan komponen Ekspor dan Impor sangat sulit diperoleh. Misalnya barang-barang dan jasa yang dibeli penduduk di luar Kota Surabaya sangat sulit dihitung besaran nilainya (dalam hal ini nilai ekspor), dan sebaliknya sangat sulit memperoleh besaran impor dari

penggunaan barang-barang atau jasa yang berasal dari luar Kota Surabaya oleh penduduk Kota Surabaya.

- ***Metode Tidak Langsung (Allocation Method)*** adalah metode penghitungan dengan cara alokasi yaitu mengalokir PDB menjadi PDRB dengan menggunakan beberapa indikator produksi dan atau indikator lainnya yang cocok sebagai alokator. Alokator yang digunakan dapat berupa :
 - Nilai produk bruto atau neto setiap sektor
 - Jumlah produksi fisik
 - Tenaga kerja
 - Penduduk dan
 - Alokator lainnya yang sesuai.

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa alokator tersebut dapat diperhitungkan persentase/bagian masing-masing untuk nilai tambah suatu sektor atau sub sektor. Model pendekatan ini digunakan karena kadang-kadang dengan data yang tersedia tidak memungkinkan untuk mengadakan penghitungan Pendapatan Regional dengan menggunakan metode langsung seperti tiga cara di atas.

B. Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Perkembangan PDRB atas dasar berlaku dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan PDRB yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya. Untuk dapat mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produksi secara nyata, faktor pengaruh harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan.

Produk riil per kapita biasanya juga dipakai sebagai indikator untuk menggambarkan perubahan tingkat kemakmuran ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk perencanaan, proyeksi dan penentuan target, selalu bertitik tolak dari perhitungan atas dasar harga konstan.

Secara konsep nilai atas dasar harga konstan dapat mencerminkan kuantum produksi pada tahun yang berjalan yang dinilai atas dasar harga

pada tahun dasar. Dari segi metode Statistik, suatu nilai atas dasar konstan diperoleh dengan cara:

- Revaluasi

Dilakukan dengan cara mengalikan kuantum pada tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang terlalu banyak disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian output pada masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

- Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang diestimasi.

Ekstrapolasi dilakukan terhadap perhitungan output atas dasar harga konstan. Dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap nilai output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

- Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan indeks harga perdagangan besar, indeks harga konsumen dan sebagainya.

- Deflasi Berganda

Dalam deflasi berganda ini yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga konsumen dan indeks harga

perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditinya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Kenyataan sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, disamping karena komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia dengan baik.

BAB IV

PERTUMBUHAN EKONOMI

4.1. Konsep dan Pengertian

Berbagai literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi seperti itu diartikan sebagai kenaikan dalam Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Sukirno, 2006). Pertumbuhan ekonomi berkaitan pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi bukan gambaran ekonomi pada suatu saat (statis), tetapi bagaimana perekonomian berkembang dari waktu ke waktu (dinamis). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan adanya perkembangan atau perubahan dalam perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan kenaikan output perkapita (Sukirno, 2006). Ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output perkapita harus melihat perkembangan output total dan jumlah penduduk. Suatu teori pertumbuhan ekonomi harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP total dan teori mengenai pertumbuhan penduduk.

Aspek lain dari pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang (Sukirno, 2006). Kenaikan output perkapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti penurunan output perkapita bukan pertumbuhan ekonomi. Namun bisa saja terjadi pada suatu tahun terjadi penurunan output. Asalkan penurunan itu sifatnya sementara dan dalam jangka waktu yang panjang output perkapita menunjukkan kecenderungan

yang jelas untuk menaik, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi.

4.2. Teknik Penghitungan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan formula sebagai berikut :

$$g = \frac{GDP_1 - GDP_0}{GDP_0} \times 100 \quad \dots\dots\dots(2.2)$$

Dalam persamaan tersebut, g adalah tingkat (persentase) pertumbuhan ekonomi, GDP₁ adalah pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan harga riil yang dicapai dalam suatu periode (misalnya tahun 1), GDP₀ adalah pendapatan nasional riil pada periode sebelumnya (misalnya satu tahun sebelumnya). Dengan menghitung harga tetap, pendapatan nasional riil yang dihitung dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan produksi barang dan jasa yang sebenarnya berlaku dalam perekonomian

4.3. Sumber– Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP riil per kapita. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product, GDP) adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara, yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. Kenaikan GDP dapat muncul melalui:

1. Kenaikan penawaran tenaga kerja.

Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama.

2. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia.

Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi.

3. Kenaikan produktivitas.

Kenaikan produktivitas masukan menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi (Case dan Fair, 1999).

4.4. Manfaat Pertumbuhan Ekonomi

Manfaat Pertumbuhan Ekonomi antara lain sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional Pendapatan perkapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan perkapita dengan kerja konstan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya.
2. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya.
3. Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya/tenaga kerja dan modal (Dornbuch, R dan Fischer, S, 1994).

BAB V

INFLASI

5.1. Konsep dan Pengertian

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Menurut Nopirin (2000), Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus selama periode tertentu, Sedangkan Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004) Inflasi dinyatakan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Penghitungan inflasi, bertujuan memberikan gambaran umum tentang tingkat stabilitas harga umum. Fluktuasi harga umum tidak mungkin diatasi sepenuhnya. upaya yang dilakukan hanya sebatas pengurangan/pengendalian hingga batas tertentu.

5.2. Teknik Penghitungan Inflasi

Inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Umum. Di Indonesia ada tiga indeks harga umum yang digunakan, yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Implisit (IHI) atau deflator PDRB dan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Namun indeks yang paling umum digunakan adalah IHK dan IHI.

1. GNP Deflator (Indeks Harga Implisit)

GNP Deflator adalah suatu indeks harga yang digunakan untuk menyesuaikan nilai uang dalam GNP guna mendapatkan nilai riil GNP. Cara perhitungan GNP deflator Dengan menggunakan indeks Paasche. Untuk menghitung IHI kita dapat menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Inflasi} = \frac{IHI_t - IHI_{t-1}}{IHI_{t-1}} \dots \dots \dots (2.3)$$

Indeks Harga Implisit adalah suatu indeks harga yang menggambarkan perbandingan antara nilai produk atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan, sedangkan perubahan Indeks Harga Implisit mencerminkan tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu

periode. Perubahan Indeks Harga Implisit dapat dianggap lebih menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dibandingkan dengan indikator inflasi lainnya seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Sembilan Bahan Pokok. Hal ini disebabkan Indeks Harga Implisit sudah mewakili semua jenis harga yaitu harga konsumen, harga produsen, harga perdagangan besar, harga eceran dan harga lainnya yang sesuai dengan berbagai jenis harga yang dipergunakan dalam penghitungan nilai produksi setiap sektor.

2. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks harga konsumen mengukur biaya pembelian sekelompok barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen. Cara perhitungan IHK menggunakan rumus Indeks Laspeyres, yaitu:

$$Inflasi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \dots\dots\dots (2.4)$$

3. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Indeks harga produsen mengukur harga sekelompok barang yang dibeli produsen yang meliputi bahan mentah, bahan pembantu atau barang setengah jadi. Dasar metode perhitungan IHP sama dengan metode perhitungan IHK dengan menggunakan rumus indeks Laspeyres. Prinsip menghitung inflasi berdasarkan data IHPB adalah:

$$Inflasi = \frac{IHPB_t - IHPB_{t-1}}{IHPB_{t-1}} \dots\dots\dots (2.5)$$

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi di Indonesia adalah dengan Indeks Harga Konsumen. Untuk menentukan angka indeks harga konsumen itu sendiri ada beberapa angka indeks yang dapat dipakai antara lain indeks Laspeyres, dan Indeks Paasche

A. Metode **Laspeyres** dirumuskan:

$$IL = \frac{\sum P_n \cdot Q_0}{\sum P_0 \cdot Q_0} \times 100 \dots\dots\dots (2.6)$$

Keterangan:

- IL = indeks Laspeyres
- P_n = harga tahun tertentu (tahun ke n)
- P₀ = harga tahun dasar
- Q₀ = kuantitas tahun dasar

B. Metode Paasche dirumuskan:

$$IP = \frac{\sum P_n \cdot Q_n \times 100}{\sum P_o \cdot Q_n} \dots\dots\dots(2.7)$$

Keterangan:

IP = indeks Paasche

P_n = harga tahun tertentu (tahun ke n)

P_o = harga tahun dasar

Q_n = kuantitas pada tahun tertentu (tahun ke-n)

5.3. Klasifikasi Inflasi

Ada berbagai cara untuk menggolongkan inflasi. Penggolongan pertama didasarkan atas parah-tidaknya inflasi tersebut. Berdasarkan ini inflasi dibagi atas (William A.Mc. Eachem, Ekonomi Makro.2000)

1. Inflasi ringan (dibawah 10 persen per tahun)
2. Inflasi sedang (10% - 30 %)
3. Inflasi berat (30-100%)
4. Hiperinflasi (diatas 100%)

Penggolongan kedua adalah atas dasar sebab musabab awal dari inflasi. Atas dasar ini inflasi dapat dibedakan atas :

1. Inflasi yang timbul akibat kenaikan permintaan masyarakat (*demand pull inflation*).
2. Inflasi yang timbul akibat kenaikan onkos produksi (*cost push inflation*)

Penggolongan inflasi ketiga adalah berdasarkan asal dari inflasi.

Dari sinikita dapat membedakan :

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*).
Inflasi yang berasal dari dalam negeri adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri itu sebdiri seperti deficit keuangan negara yang dibiayai (ditutupi) dengan pencetakan uang baru, atau pengenaan pajak oleh pemerintah.
2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*).
Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi akibat pengaruh kenaikan harga barang-barang dari luar negeri.

5.4. Keterbatasan Perhitungan Inflasi

Perhitungan inflasi menggunakan IHK dan IHPB mempunyai keterbatasan, karena hanya memperhitungkan beberapa ratus barang dari beberapa puluh kota saja. Padahal barang yang diproduksi dan dikonsumsi tidak hanya barang yang diperhitungkan saja, namun masih banyak barang yang mungkin belum dimasukkan dalam perhitungan padahal barang tersebut diproduksi dan dikonsumsi. Kegiatan ekonomi juga tidak terjadi di beberapa kota saja, melainkan di seluruh pelosok tanah air.

BAB VI

MASALAH PENGANGGURAN

6.1. Konsep dan Pengertian

Menurut Ida Bagoes Mantra, pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Konsep ini sering diartikan sebagai keadaan pengangguran terbuka. Menurut Dumairy Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan.

6.2. Teknik Penghitungan Tingkat Pengangguran

Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\Sigma \text{Pengangguran}}{\Sigma \text{Angkatan Kerja}} \times 100\% \dots (2.8)$$

6.3. Klasifikasi Pengangguran

1. Pengangguran Friksional / *Frictional Unemployment*.

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lapangan pekerjaan.

2. Pengangguran Struktural / *Structural Unemployment*

Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Pengangguran Musiman / *Seasonal Unemployment*

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Contohnya seperti

petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian.

4. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

6.4. Keterbatasan Pengukuran Pengangguran

Mengukur pengangguran kentara (open unemployment) atau benar-benar menganggur sangatlah mudah dan cepat, tetapi mengukur pengangguran terselubung (disguised unemployment) tidak mudah, sebab mereka tidak benar-benar menganggur. Artinya tenaga kerja yang tergolong pengangguran terselubung (disguised unemployment) tidak bisa dideteksi dengan formulasi rumus yang general, karena konsep ini berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Misalnya orang yang memiliki kompetensi setara Sarjana strata 1 tetapi bekerja sebagai tenaga honorer paruh waktu di sebuah perusahaan, maka kemampuan dan waktu yang seharusnya dapat dipergunakan bekerja secara penuh tidak dapat dilakukan.

BAB VII

PERDAGANGAN EKSPOR DAN IMPOR

7.1. Konsep dan Pengertian

Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara sudah terjadi sejak zaman dahulu, tentu saja dengan ruang lingkup yang terbatas. Perdagangan terjadi karena pemenuhan kebutuhan dalam negeri tidak dapat dipenuhi (tidak dapat diproduksi di dalam negeri) sehingga akan dipenuhi dengan mendatangkan barang dari negara lain dan muncullah apa yang kemudian disebut dengan transaksi perdagangan internasional. Pada mulanya transaksi tersebut dilakukan dengan cara barter (pertukaran langsung barang dengan barang lain yang dibutuhkan kedua belah pihak, yang masing-masing tidak dapat memproduksi barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri).

Pertukaran/perdagangan dapat terjadi karena adanya perbedaan di kedua negara, antara lain dalam hal kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia/ tenaga kerja, struktur ekonomi, kondisi iklim, serta keadaan geografis. Adanya perbedaan tersebut dan atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan, maka terjadilah pertukaran yang kemudian secara umum dapat dikatakan sebagai perdagangan internasional. Adapun sebab-sebab umum yang mendorong terjadinya perdagangan internasional (Halwani, 2005) adalah sebagai berikut

1. Sumber daya alam (*natural resources*)
2. Sumber daya modal (*capital resources*)
3. Tenaga kerja (*human resources*)
4. Teknologi

Dalam ekonomi makro, perdagangan internasional terjadi karena adanya pertukaran barang antar dua negara yang saling menguntungkan (terjadi kegiatan ekspor-import), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut,

$$Y = C + I + G + (X - M) \dots\dots\dots(2.9)$$

di mana:

Y = Pendapatan Nasional
C = pengeluaran konsumsi

I = Investasi

G = pengeluaran pemerintah

X = pengeluaran ekspor

M = pengeluaran impor

Berdasarkan persamaan di atas maka dalam perdagangan internasional muncullah apa yang disebut dengan kegiatan ekspor dan import. Kegiatan ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean suatu negara ke negara lain dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. (Ahsjar, 2007). Sedangkan kegiatan import merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean suatu negara dengan memenuhi ketentuan yang berlaku (Ahsjar, 2007).

7.2. Penghitungan Ekspor dan Impor

A. Ekspor Impor dan Tingkat Keterbukaan Ekonomi

Negara yang melakukan liberalisasi perdagangan merupakan negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, dimana penduduk negara tersebut telah melakukan perdagangan dengan penduduk negara lain baik itu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, maupun sektor pemerintah. Negara yang mempunyai kelebihan sumber daya baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia dapat melakukan spesialisasi yaitu dengan memproduksi barang dan jasa yang mempunyai keunggulan komparatif di negara tersebut. Hasil produksi tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan domestik maupun untuk ekspor ke luar negeri. Sedangkan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi dalam negeri dapat diimpor dari luar negeri.

Pendapatan dari ekspor merupakan sumber devisa negara. Negara dapat melakukan ekspor jika barang dan jasa negara yang bersangkutan mempunyai daya saing di pasar internasional. Ekspor merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Semakin banyak jumlah barang yang dapat diekspor, semakin besar pengeluaran agregat, dan semakin tinggi pula pendapatan nasional yang diperoleh oleh negara yang bersangkutan. Namun, pendapatan nasional yang tinggi belum tentu meningkatkan ekspor. Sifat yang seperti ini menunjukkan bahwa ekspor dianggap sebagai variabel eksogen (Lihat Gambar 2.2. bagian a).

Impor mempunyai sifat yang berlawanan terhadap ekspor. Semakin besar impor, semakin tinggi pula devisa yang digunakan untuk membiayai

impor dan akan mengurangi pendapatan nasional, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan langsung antara impor dengan pendapatan nasional yang nilainya ditentukan oleh kecenderungan mengimpor atau MPM (m).

$$m = \frac{\Delta M}{\Delta Y} \dots\dots\dots (2.10)$$

Hubungan antara impor dan pendapatan nasional secara matematis dirangkum oleh fungsi impor sebagai berikut:

$$M = M_0 + mY \dots\dots\dots (2.11)$$

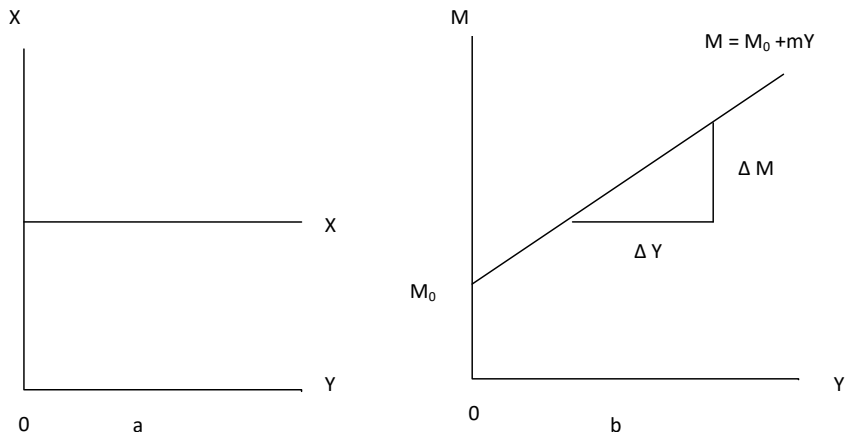
Dimana:

M = jumlah impor

M_0 = jumlah impor yang nilainya tidak ditentukan oleh Y

m = marginal propensity to import.

Y = pendapatan nasional



Sumber: Deliarnov (1995)

Gambar 2.2 Hubungan Antara Ekspor Dan Impor Dengan Tingkat Pendapatan Nasional

Keterangan :

- A. Ekspor ditentukan oleh faktor eksogen dan tidak tergantung pada besarnya pendapatan nasional.
- B. Impor dan pendapatan nasional yang berkaitan erat. Makin besar pendapatan nasional, makin besar impor, ditentukan oleh *marginal propensity to import*.

Derajat keterbukaan ekonomi adalah total perdagangan (ekspor + impor) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Derajat keterbukaan ekonomi yang merupakan rasio perdagangan terhadap PDB ini sangat mendorong pertumbuhan ekonomi.

BAB VIII

BONUS DEMOGRAFI (PENDUDUK)

8.1. Konsep dan Pengertian

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Konsep penduduk menurut BPS “ Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap”. Sedangkan Konsep penduduk menurut Badan Kependudukan dan Catatan sipil “penduduk adalah orang yang mempunyai KTP dan atau mempunyai KK (beridentitas)”. Jumlah penduduk yang besar dan mempunyai ketrampilan merupakan aset yang berharga dalam proses pembangunan. Berikut adalah beberapa konsep dan defiisi yang terkait dengan kependudukan (BPS Surabaya.2011):

- a. Rumah Tangga Adalah sekelompok orang-orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan mengurus keperluan hidupnya sendiri-sendiri.
- b. Warga Negara Indonesia Asli (WNI) Adalah penduduk yang berstatus sebagai warga negara indonesia dan bukan keturunan asing.
- c. Warga Negara Asing (WNA) Adalah orang-orang yang mempunyai legalitas kewarganegaraan asing
- d. Penduduk Dewasa. Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan penduduk kurang kurang dari 15 tahun tetapi sudah kawin.
- e. Penduduk Anak-Anak Adalah penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan belum kawin.
- f. Sex Ratio. Banyaknya penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan.
- g. Kepadatan Adalah penduduk persatu unit wilayah (Pendudk per km²)
- h. Datang Adalah orang/ penduduk yang meninggalkan tempat asal menuju ke dsa/ kelurahan lain

- i. Pindah Adalah orang/ penduduk yang meninggalkan tempat asal menuju ke desa/ kelurahan lain.
- j. Pertumbuhan Penduduk Adalah angka rata-rata yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk tahun dasar.

8.2. Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Prediksi jumlah penduduk yang akan datang dapat bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan dasar penduduk, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di bidang pemenuhan kebutuhan akan lahan misalnya penggunaan lahan (BPS Indonesia, 2000).

Badan Pusat Statistik Indonesia (2000) menyatakan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau negara dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk awal (misal P_0) dengan jumlah penduduk di kemudian hari (misal P_t). Tingkat pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus geometrik. Dengan rumus pertumbuhan geometrik, angka pertumbuhan penduduk (*rate of growth*) sama untuk setiap tahun, rumusnya:

$$P_t = P_0 (1+r)^t \dots\dots\dots (2.13)$$

Keterangan:

P_0 = jumlah penduduk awal

P_t = jumlah penduduk t tahun kemudian

r = tingkat pertumbuhan penduduk

t = jumlah tahun dari 0 ke t

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan persebaran penduduk secara geografis adalah persebaran atau distribusi penduduk yang tidak merata. Penyebab utamanya adalah keadaan tanah dan lingkungan yang kurang mendukung bagi kehidupan penduduk secara layak.

Menurut Fandeli et al. (2008) perkembangan penduduk menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan kelestarian. Perkembangan penduduk menyebabkan kebutuhan lahan

semakin meningkat dan menyebabkan peralihan fungsi hutan ke penggunaan yang lain. Selanjutnya Sitorus et al. (2010) menyatakan perkembangan jumlah penduduk yang terlalu banyak dapat mengakibatkan penggunaan sumberdaya yang berlebihan.

Semakin tinggi pertumbuhan penduduk mengakibatkan perubahan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kaidah konservasi yang dapat mengakibatkan bencana banjir, longsor, dan kekeringan yang merupakan bukti dari perubahan penggunaan lahan yang berakibat terhadap kerusakan lahan. Semakin besar perubahan penggunaan lahan yang dilakukan oleh manusia dapat berakibat terhadap munculnya dan meluasnya lahan kritis (Kodoatie dan Sjarief, 2008).

8.3. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk yaitu pengelompokkan penduduk berdasarkan kriteria (ukuran) tertentu. Dasar untuk menyusun komposisi penduduk yang umum digunakan adalah umur, jenis kelamin, mata pencaharian, dan tempat tinggal. Pengelompokkan penduduk dapat digunakan untuk dasar dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan program dalam mengatasi masalah-masalah di bidang kependudukan.

A. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.

Umur penduduk dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Umur 0 – 14 tahun dinamakan usia muda/usia belum produktif.
- b. Umur 15 – 64 tahun dinamakan usia dewasa/usia kerja/usia produktif.
- c. Umur 65 tahun keatas dinamakan usia tua/usia tak produktif/usia jompo.

Sesuai dengan pengelompokkan umur di atas, maka struktur (susunan) penduduk negara-negara di dunia dibagi 3 yaitu:

- Struktur penduduk muda: bila suatu negara atau wilayah sebagian besar penduduk usia muda.
- Struktur penduduk dewasa: bila suatu negara sebagian besar penduduk berusia dewasa.
- Struktur penduduk tua: bila suatu negara sebagian besar terdiri penduduk berusia tua.

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk grafik yang dinamakan piramida penduduk. Bentuk piramida penduduk ada 3 macam yaitu:

1. Piramida penduduk muda berbentuk limas

Piramida ini menggambarkan jumlah penduduk usia muda lebih besar dibanding usia dewasa. Di waktu yang akan datang jumlah penduduk bertambah lebih banyak. Jadi penduduk sedang mengalami pertumbuhan.

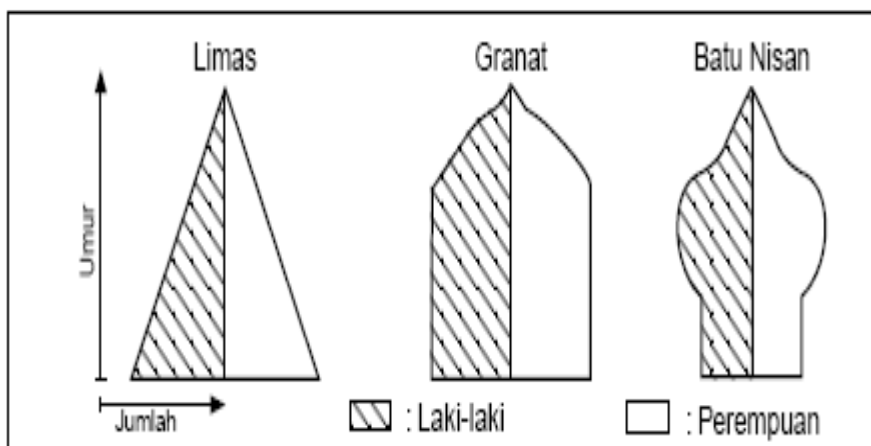
2. Piramida penduduk stasioner atau tetap berbentuk granat

Bentuk ini menggambarkan jumlah penduduk usia muda seimbang dengan usia dewasa. Hal ini berarti penduduk dalam keadaan stasioner sehingga pertambahan penduduk akan tetap diwaktu yang akan datang.

3. Piramida penduduk tua berbentuk batu nisan

Piramida bentuk ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda lebih sedikit bila dibandingkan dengan usia dewasa. Diwaktu yang akan datang jumlah penduduk mengalami penurunan karena tingkat kelahiran yang rendah dan kematian yang tinggi.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki piramida penduduk berbentuk limas dan negara-negara maju umumnya berbentuk granat dan sebagian kecil berbentuk batu nisan seperti terlihat pada gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2.3
Piramida Penduduk

Pembuatan piramida penduduk dapat digunakan antara lain untuk:

- Mengetahui perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan.
- Mengetahui keadaan jumlah penduduk di waktu yang akan datang.
- Untuk mengetahui struktur umur penduduk suatu negara secara umum.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin didasarkan atas jenis pria dan wanita. Komposisi ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kelahiran seperti jika sebagian besar penduduk suatu negara terdiri wanita usia subur (15-44 tahun) maka tingkat kelahiran akan tinggi. Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di daerah/negara tertentu pada tahun tertentu disebut perbandingan jenis kelamin (Sex Ratio)

Rumus untuk menghitungnya:

$$SexRatio = \frac{L}{P} \times 100 \dots\dots\dots (2.14)$$

Dimana :

L = Jumlah penduduk laki-laki

P = Jumlah Penduduk Perempuan

100 = Konstanta

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu angka perbandingan yang menunjukkan besar beban tanggungan dari kelompok usia produktif. Usia produktif (15 – 64 tahun) selain menanggung kebutuhan hidup dirinya juga menanggung kebutuhan hidup golongan usia muda (0 – 14 tahun) dan golongan tua (65 tahun ke atas).

Rumus untuk menghitungnya:

$$DR = \frac{\sum \text{Pendudukusia muda} + \sum \text{Pendudukusia tua}}{\sum \text{pendudukusia produktif}} \dots\dots\dots (2.15)$$

Makin besar rasio ketergantungan, makin besar beban yang ditanggung oleh kelompok usia produktif. Apabila suatu negara besarnya rasio ketergantungan misalnya 65 berarti setiap 100 orang penduduk yang produktif menanggung beban hidup orang yang belum atau tidak produktif sebanyak 65 orang.

B. Komposisi penduduk menurut pekerjaan

Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain pegawai negeri sipil, TNI, POLRI, buruh, pedagang, petani, pengusaha dan sopir.

C. Komposisi penduduk menurut pendidikan

Berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang telah ditamatkan penduduk dapat dikelompokkan dalam tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Pengelompokkan ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya tingkat pendidikan penduduk.

D. Komposisi Penduduk menurut Agama

Pengelompokkan ini berdasarkan kepada agama yang dianut penduduk yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha.

E. Komposisi penduduk menurut tempat tinggal

Tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah tempat tinggal penduduk di desa dan di kota. Ciri khas negara agraris seperti Indonesia adalah sebagian besar penduduk tinggal di desa.

F. Tingkat Penyebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap Km² pada suatu wilayah negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau negara sebagai berikut:

1. Faktor Fisiografis
2. Faktor Biologis
3. Faktor Kebudayaan dan Teknologi

Kepadatan penduduk dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kepadatan penduduk aritmatik sangat mudah dalam perhitungannya. Data kepadatan penduduk aritmatik sangat bermanfaat. Contohnya adalah dengan diketahui tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah, maka dapat digunakan untuk perencanaan penyediaan fasilitas sosial. Jika pada suatu daerah memiliki kepadatan penduduk aritmatik yang rendah, maka penyediaan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dapat digabung dengan daerah yang berdekatan.
2. Kepadatan penduduk Indonesia antara pulau yang satu dan pulau yang lain tidak seimbang. Selain itu, kepadatan penduduk antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain juga tidak seimbang. Hal ini disebabkan karena persebaran penduduk tidak merata.

Sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa dan Madura. Padahal, luas wilayah pulau Jawa dan Madura hanya sebagian kecil dari luas wilayah negara Indonesia. Akibatnya, pulau Jawa dan Madura memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan di daerah-daerah lain tingkat penduduknya rendah. Provinsi yang paling padat penduduknya adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Daya dukung lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia tidak sama. Daya dukung lingkungan pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain, sehingga setiap satuan luas di Pulau Jawa dapat mendukung kehidupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan, misalnya di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatra.

Kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kehidupan itu ada batasnya. Apabila kemampuan wilayah dalam mendukung lingkungan terlampaui, dapat berakibat pada terjadinya tekanan=tekanan penduduk. Jadi, meskipun di Jawa daya dukung lingkungannya tinggi, namun juga perlu diingat batas kemampuan wilayah tersebut dalam mendukung kehidupan.

BAB IX

KETENAGA KERJAAAN

9.1. Konsep dan Pengertian

Tenaga kerja (*man power*) merupakan seluruh penduduk yang dianggap memiliki potensi untuk bekerja secara produktif (Adioetomo, 2010). Hal ini berarti penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa dapat disebut sebagai tenaga kerja. Terdapat tiga pendekatan pemberdayaan yang didasarkan pada pengukuran kegiatan ekonomi yang dijadikan tolak ukur untuk analisis ketenagakerjaan yaitu *Gainful Worker Approach*, *Labor Force Approach*, dan *Labor Utilization Approach*. Masing-masing konsep atau teori tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Konsep *Gainful Worker Approach*

Konsep ini menjelaskan tentang aktivitas ekonomi orang yang pernah bekerja atau biasa dilakukan seseorang (*usual activity*). Kata biasa dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa usaha tidak menganggap penting kegiatan-kegiatan lain yang tidak termasuk biasa dilakukan. Contohnya orang yang biasanya sekolah namun pada kondisi sekarang sedang mencari kerja maka hal ini diklasifikasikan sebagai orang yang sekolah. Teori ini tidak dapat menggambarkan secara statistik mengenai kondisi mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan sehingga angka pengangguran terbuka relatif kecil.

b. Konsep Angkatan Kerja (*Labor Force Approach*)

Pendekatan ini memberikan batas yang jelas tentang kegiatan yang dilakukan dalam seminggu ini, sehingga secara tegas dapat diketahui kegiatan apa yang benar-benar dilakukan sebagai kegiatan utamanya. Pendekatan ini lebih dikenal sebagai pendekatan aktivitas kini dengan jangka waktu tertentu (Mantra, Ida Bagus 2009).

Menurut Adioetomo (2010), terdapat dua perbaikan yang diusulkan dalam konsep ini yaitu:

1. *Activity Concept* , bahwa yang termasuk dalam angkatan kerja (*labor force*) haruslah orang yang secara aktif bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan.

2. Aktivitas tersebut dilakukan dalam suatu batasan waktu tertentu sebelum wawancara. Dengan kata lain, konsep angkatan kerja-umumnya disertai dengan referensi waktu. Berdasarkan konsep tersebut, angkatan kerja (*labor force*) dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Bekerja.
 - b. Mencari pekerjaan (menganggur), yang dapat dibedakan antara:
 1. Mencari pekerjaan, tetapi sudah pernah bekerja sebelumnya dan
 2. Mencari pekerjaan untuk pertama kalinya (belum pernah bekerja sebelumnya).

Angkatan kerja dapat dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam konsep angkatan kerja ini harus ada referensi waktu yang pasti, misalnya satu minggu sebelum pencacahan.

c. Konsep Pemanfaatan Tenaga Kerja (*Labor Utilization Approach*)

Pendekatan ini awalnya dikembangkan oleh Philip M Hauser untuk memperbaiki konsep *Labor Force*. Pendekatan *Labor Utilization* dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan konsep angkatan kerja, terutama supaya lebih sesuai dengan keadaan negara berkembang. Pendekatan dalam konsep ini lebih ditujukan untuk melihat potensi tenaga kerja, apakah telah dimanfaatkan secara penuh. Dengan konsep ini, angkatan kerja dikelompokkan sebagai berikut.

- a. Pemanfaatan penuh (*fully utilized*).
- b. Pemanfaatan kurang (*under-utilized*), karena jumlah jam kerja yang rendah, pendapatan upah atau gaji yang rendah dan tidak sesuai dengan kemampuan atau keahliannya. Biasa disebut setengah penganggur. Untuk point a dan b didasarkan pada jumlah jam kerja seminggu
- c. Pengangguran terbuka (*open unemployment*)

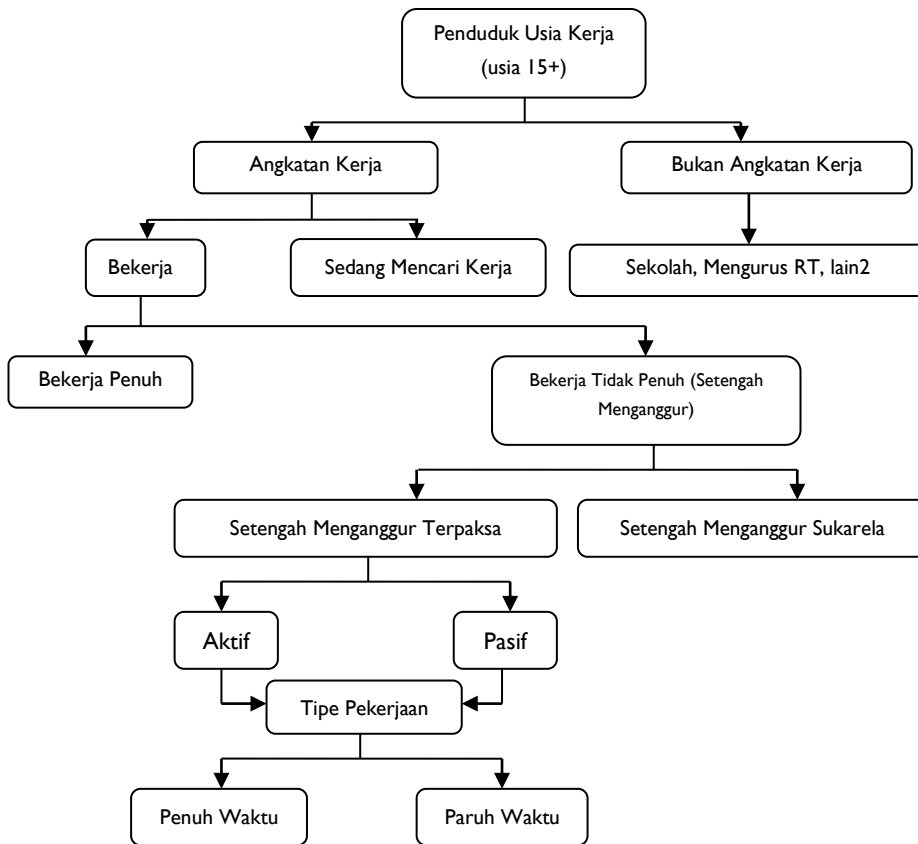
Berdasarkan teori-teori di atas maka secara umum pengukuran kegiatan ekonomi dapat didekati dengan dua cara, yakni *Gainful Worker Approach* (pendekatan kebiasaan) dan *Labor Force Approach* (pendekatan angkatan kerja). Dalam *Gainful Worker Approach* seseorang dalam batas umur tertentu akan ditanya mengenai kegiatan apa yang biasa dia lakukan. Pendekatan ini kurang dapat member gambaran statistik yang tepat antara mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Konsep ini cenderung menghasilkan angka penganggur terbuka yang relatif kecil. Pendekatan lain yang lebih sesuai adalah *Labor Force Approach*. Dalam pendekatan ini seluruh penduduk dalam kelompok umur tertentu dan dalam kurun waktu tertentu ditanyai mengenai kegiatan utama yang dia lakukan. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan batas yang tegas dalam jangka waktu seminggu ini mengenai kegiatan utama apa yang dilakukan. Di Indonesia, konsep *Labor Force Approach* digunakan sejak Sensus Penduduk 1961.

Pada Gambar 2.4 menggambarkan pembagian penduduk usia kerja menurut kegiatan ekonomi. Penduduk usia kerja atau tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun). Tenaga kerja selanjutnya dibagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Di Indonesia, yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Sementara itu, mereka yang berusia 15 – 64 tahun yang tidak bekerja atau tidak mencari pekerjaan karena sekolah, mengurus rumah tangga, pensiun atau secara fisik dan mental tidak memungkinkan untuk bekerja tidak dimasukkan dalam angkatan kerja.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Bekerja diartikan sebagai melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan atau membantu menghasilkan barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dalam kurun waktu tertentu. Dalam *Labor Force Approach (LFA)*, dikembangkan lagi suatu

pendekatan yaitu, *Labor Utilization Approach (LUA)*. Dalam LUA, penduduk yang bekerja dibagi menjadi dua, yaitu bekerja penuh (*fully employed*) dan bekerja tidak penuh atau setengah menganggur (*under employed*). Klasifikasi tersebut didasarkan pada jumlah jam kerja selama satu minggu.

Setengah menganggur adalah penduduk yang bekerja dengan jam kerja yang rendah yaitu kurang dari 35 jam seminggu. Setengah menganggur dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu setengah penganggur sukarela dan setengah penganggur terpaksa. Setengah penganggur sukarela adalah yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tetapi tidak ingin mencari pekerjaan dan diberi tambahan pekerjaan pun tidak mau menerima. Selanjutnya, setengah penganggur terpaksa dibagi menjadi setengah penganggur terpaksa aktif mencari pekerjaan dan setengah penganggur pasif dalam mencari pekerjaan tambahan. Kelompok ini tidak mencari pekerjaan tetapi kalau diberi tambahan pekerjaan bersedia menerimanya. Baik setengah penganggur terpaksa aktif maupun pasif dihubungkan dengan tipe pekerjaan, yaitu pekerjaan paruh waktu (*part time*) dan pekerjaan penuh (*full time*).



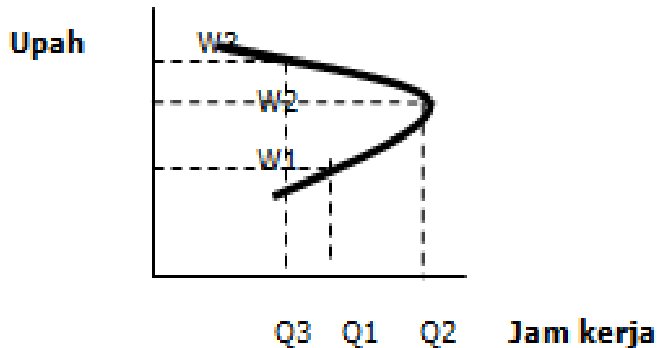
Sumber: Mantra, 2009

Gambar 2.4
Pembagian Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Ekonomi

9.2. Teori Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Menurut G.S Becker (1986), Kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang (*leisure*). Sedangkan kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu.

Bekerja sebagai kontroversi dari *leisure* menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan.



Sumber: Borjas, 2004: 156

Gambar 2.5

Backward Bending Curve Penawaran Tenaga Kerja

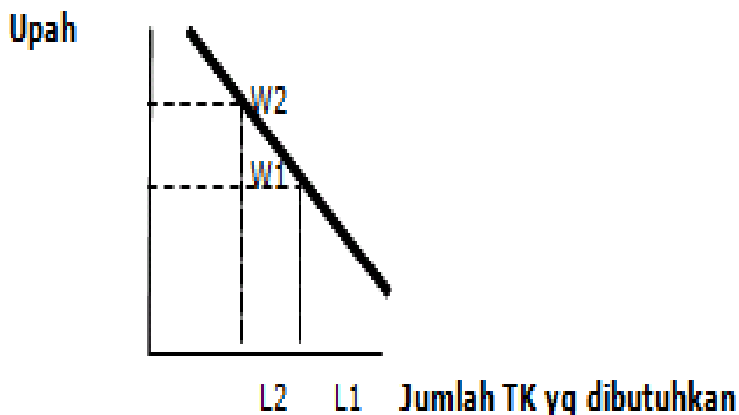
Kombinasi waktu non pasar dan barang-barang pasar terbaik adalah kombinasi yang terletak pada kurva indefferensi tertinggi yang dapat dicapai dengan kendala tertentu. Sebagaimana gambar 2.4, kurva penawaran tenaga kerja mempunyai bagian yang melengkung ke belakang. Pada tingkat upah tertentu peryediaan waktu kerja individu akan bertambah apabila upah bertambah (dari W1 ke W2). Setelah mencapai upah tertentu, pertambahan upah justru mengurangi waktu yang disediakan oleh individu untuk keperluan bekerja. Pertambahan upah dari W2 ke W3 akan menurunkan jumlah jam kerja yang disediakan oleh tenaga kerja dari Q2 ke Q3. Hal ini yang dinamakan *Backward Bending Supply Curve*. Layard dan Walters (1978), menyebutkan bahwa keputusan individu untuk menambah atau mengurangi waktu luang dipengaruhi oleh tingkat upah dan pendapatan nonkerja. Adapun tingkat produktivitas selalu berubah-ubah sesuai dengan fase produksi dengan pola mula-mula naik mencapai puncak kemudian menurun.

9.3. Teori Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan adalah suatu hubungan antar harga dan kuantitas. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan adalah hubungan antara tingkat upah (yang ditilik dari prespektif seorang majikan adalah harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk dipekerjakan (dalam hal ini dapat dikatakan dibeli). Secara khusus, suatu kurva permintaan menggambarkan jumlah maksimum yang dikehendaki seorang pembeli untuk membelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal tenaga kerja, kurva permintaan menggambarkan jumlah maksimum tenaga kerja yang seorang tenaga kerja pengusaha bersedia untuk mempekerjakannya pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.

Kurva permintaan tenaga kerja miring ke kiri (*downward sloping*) karena semakin tinggi upah yang diberikan, maka semakin sedikit jumlah tenaga kerja yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah upah yang diberikan, maka perusahaan lebih banyak meminta tenaga kerja.



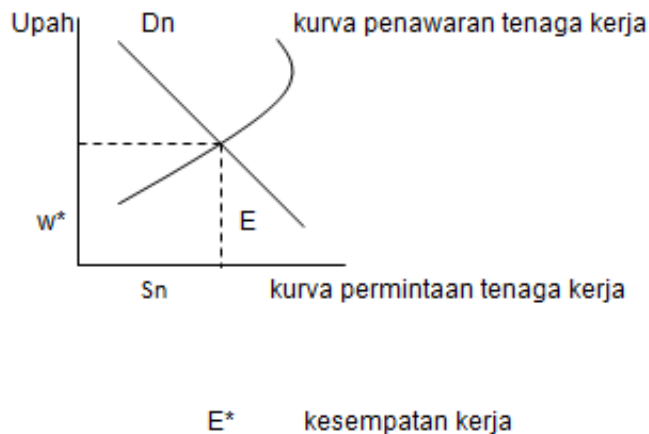
Sumber: Borjas, 2006

Gambar 2.6
Kurva Permintaan Tenaga Kerja

9.4. Interaksi Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

A. Keseimbangan Dalam Pasar Tenaga Kerja *Single Competitif*

Kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah jam kerja dari pekerja pada berbagai tingkat upah. Sedangkan kurva permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah jam kerja yang digunakan oleh perusahaan pada berbagai tingkat upah. Keseimbangan terjadi pada saat penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja yaitu di titik upah keseimbangan w^* dan jumlah jam kerja sebanyak E^* . Setelah tingkat upah keseimbangan tercapai, setiap perusahaan di dalam industri berusaha mempekerjakan orang sampai pada titik dimana nilai marginal produk tenaga kerja (*value of marginal product of labor*) sama dengan upah di pasar kerja yang kompetitif yaitu di titik E.

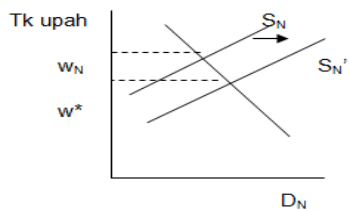


Gambar 2.7
Keseimbangan Di Pasar Kerja Yang Kompetitif

Mengapa upah bisa naik turun? Dalam perekonomian yang modern, terdapat kendala yang dihadapi berupa gangguan (*shock*) yang terjadi baik di sisi permintaan maupun penawaran. Upah dan kesempatan kerja yang selalu berubah merupakan respon dari perubahan yang terjadi dari sisi ekonomi, politik dan sosial. Ketika pasar kerja bereaksi terhadap gangguan yang terjadi, upah dan kesempatan kerja akan selalu bergerak menuju titik keseimbangan yang baru.

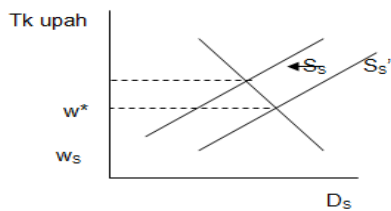
B. Keseimbangan Kompetitif antar Pasar Tenaga Kerja

Bagaimana keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi bila di daerah utara mempunyai upah yang lebih tinggi dari daerah selatan? Diasumsikan dua pasar ini mempekerjakan pekerja yang memiliki ketrampilan yang sama sehingga orang yang bekerja di daerah Utara memiliki substitusi yang sempurna dengan daerah di Selatan. Upah keseimbangan di daerah Utara w_N melebihi upah keseimbangan di daerah Selatan w_S . Kurva permintaan dan penawaran di masing-masing pasar yaitu S_N dan D_N untuk daerah Utara sedangkan S_S dan D_S untuk daerah Selatan. Pekerja di daerah Selatan melihat upah di daerah Utara lebih besar, akan berpindah untuk bekerja di Utara. Penghasilan yang besar menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih besar. Sebaliknya perusahaan melihat adanya perbedaan upah di kedua daerah, akan berpindah ke daerah Selatan yang memiliki karakteristik tingkat upah yang lebih rendah dibandingkan di Utara, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan lebih besar dengan mempekerjakan pekerja yang lebih murah. Jika pekerja berpindah antar daerah dengan bebas, perpindahan pekerja (migrasi) akan mengubah kurva penawaran baik di daerah Utara maupun Selatan. Di daerah Selatan, kurva penawaran tenaga kerja akan bergeser ke kiri (ke S_S') sampai sebagian pekerja di daerah Selatan meninggalkan daerahnya menuju daerah Utara. Akibatnya karena pekerja sangat langka di daerah Selatan, upah pekerja mengalami kenaikan. Sebaliknya di daerah Utara, kurva penawaran tenaga kerja akan bergeser ke kanan (ke S_N'), sebagai akibat pekerja di daerah Selatan terus berdatangan. Dampaknya, upah di daerah Utara mengalami penurunan. Jika ada kebebasan bagi pekerja untuk berpindah dan kebebasan untuk keluar atau masuk ke pasar, maka dampaknya perekonomian nasional akan menghasilkan tingkat upah tunggal yaitu sebesar w^* .



Kesemp kerja

Pasar tenaga kerja di Utara



Kesemp kerja

Pasar tenaga kerja di Selatan

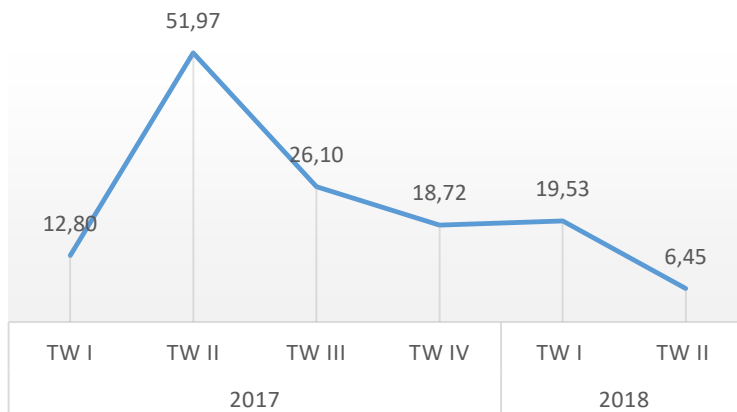
BAB X

EVALUASI PENYUSUNAN PELUANG INVESTASI

10.1. Gambaran Umum Penanaman Modal Di Kota Surabaya

Hasil analisis terkait gambaran umum penanaman modal di kota Surabaya akan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Perkembangan realisasi nilai investasi baik PMA dan PMDN Kota Surabaya selama Tahun 2017 Triwulan I sampai tahun 2018 Triwulan II menunjukkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2017 saat Triwulan I nilai investasi baik PMA dan PMDN mencapai Rp. 12.797.270.155.655,70. Kemudian pada saat Triwulan II realisasi investasi mencapai Rp. 51.971.147.459.783,00. Realisasi investasi pada Triwulan III mencapai Rp. 26.104.383.526.434,80 dan Triwulan IV mencapai Rp. 18.723.520.349.786,00. Tahun 2018 saat Triwulan I kembali mengalami kenaikan, dengan nilai realisasi investasi mencapai Rp 19.532.994.541,60. Namun di triwulan II terjadi penurunan nilai invetasi yang sangat signifikan menjadi sebesar Rp 6,445,861,897,640.86.

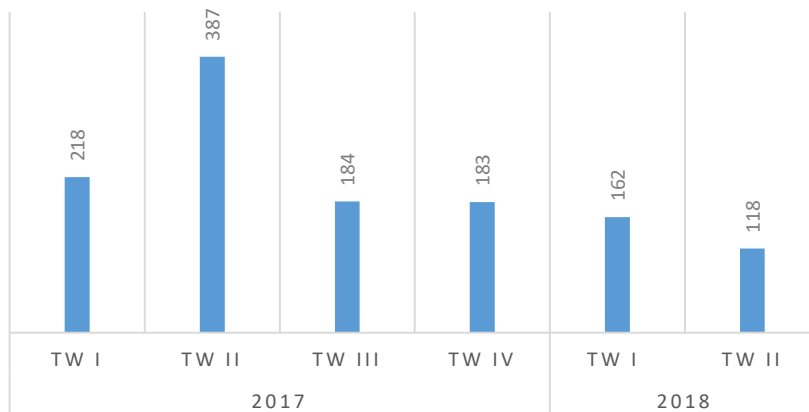


Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2018

Gambar 5.1
Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2017-2018 Triwulan II
(Rp. Triliun)

- 2) Realisasi jumlah proyek penanaman modal baik PMA dan PMDN Kota Surabaya selama Tahun 2017 Triwulan I sampai tahun 2018 Triwulan

II menunjukkan trend yang cenderung menurun. Pada saat Triwulan I jumlah proyek yang merealisasikan kegiatan penanaman modal sebesar 218 proyek. Pada Triwulan II realisasi proyek sebesar 387 proyek. Kemudian pada Triwulan III realisasi proyek sebesar 184 proyek. Pada Triwulan IV realisasi jumlah proyek investasi mencapai 183 proyek. Sedangkan pada tahun 2018 Triwulan I, realisasi proyek sebesar 162 proyek dan di triwulan II sebesar 118 proyek.



Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2018

Gambar 5.2
Perkembangan Realisasi Jumlah Proyek Investasi
Tahun 2017-2018 Triwulan II

- 3) Berdasarkan realisasi penyerapan tenaga kerja, perkembangan penyerapannya cukup fluktuatif selama Tahun 2017 Triwulan I sampai tahun 2018 Triwulan II . Pada saat Triwulan I realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 11.674 pekerja yang terdiri dari Indonesia sebesar 11.601 pekerja dan 73 pekerja berasal dari luar Indonesia (Asing). Pada saat Triwulan II realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 12.039 pekerja yang terdiri dari Indonesia sebesar 11.958 pekerja dan 81 pekerja berasal dari luar Indonesia (Asing). Pada Triwulan III realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 3.225 pekerja yang terdiri dari pekerja yang terdiri dari Indonesia mencapai 3.225 pekerja dan sebanyak 26 pekerja asing. Pada Triwulan IV realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 2.390 pekerja yang terdiri dari 2.372 pekerja dari Indonesia dan 18 pekerja dari luar Indonesia (asing). Untuk

realisasi penyerapan tenaga kerja di tahun 2018 Triwulan I mencapai 1.098 pekerja yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.082 pekerja dan tenaga kerja asing sebanyak 16 pekerja. Sedangkan di triwulan II, realisasi penyerapan tenaga kerja sebesar 626 pekerja yang terdiri tenaga kerja Indonesia sebesar 623 pekerja dan tenaga kerja asing sebanyak 3 pekerja.

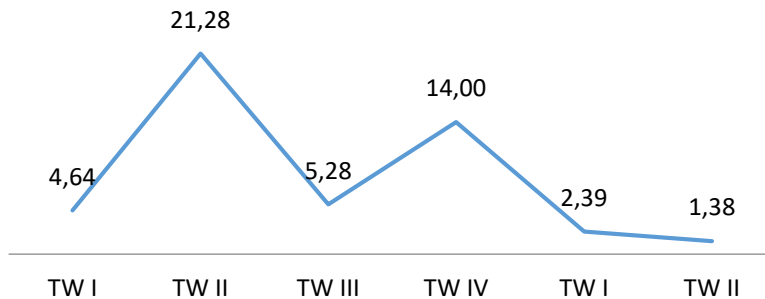
Tabel 5.1

Perkembangan Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Kegiatan Investasi Tahun 2017-2018 Triwulan II

Tahun	Periode	PMA		PMDN		PMA + PMDN		TOTAL
		Indonesia	Asing	Indonesia	Asing	Indonesia	Asing	
2017	TW I	3.147	71	8.454	2	11.601	73	11.674
	TW II	5.326	73	6.632	8	11.958	81	12.039
	TW III	536	26	2.689	-	3.225	26	3.251
	TW IV	1.348	18	1.024	-	2.372	18	2.390
2018	TW I	372	15	710	1	1.082	16	1.098
	TW II	174	3	449	-	623	3	626

Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2018

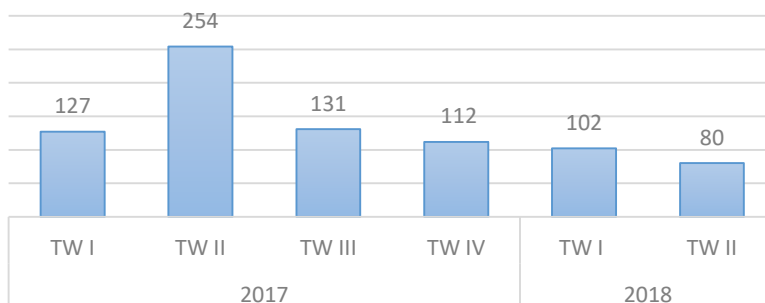
- 4) Nilai realisasi PMA selama Tahun 2017 Triwulan I sampai tahun 2018 Triwulan II perkembangan trendnya cenderung fluktuatif. Pada Triwulan II realisasi nilai PMA mencapai Rp. 4.641.721.224.873. Kemudian realisasi nilai investasi PMA mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.285.619.868.721,50 di Triwulan II. Pada Triwulan III nilai realisasi investasi mengalami penurunan sebesar Rp. 5.283.856.307.559,14. Nilai realisasi investasi pada Triwulan IV kemudian mengalami kenaikan sebesar Rp. 14.006.496.533.148,00. Namun di tahun 2018 Triwulan I, nilai realisasi investasi PMA mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 2.397.556.252.520,89. Untuk Triwulan II, nilai realisasi investasi PMA kembali turun hingga menjadi sebesar Rp 1.376.828.707.847,11.



Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2018

Gambar 5.3
Perkembangan realisasi investasi PMA Tahun 2017-2018 Triwulan II
(Rp.Triliun)

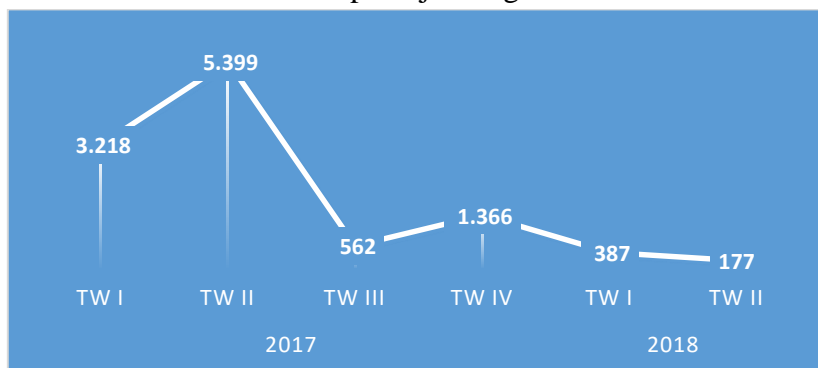
- 5) Realisasi jumlah proyek PMA selama Tahun 2017 Triwulan I sampai tahun 2018 Triwulan II perkembangannya cenderung mengalami penurunan. Pada Triwulan I realisasi jumlah proyek PMA mencapai 127 proyek. Kemudian pada Triwulan II realisasi jumlah proyek PMA mencapai 254 proyek. Triwulan III realisasi proyek PMA mencapai 131 proyek. Pada Triwulan IV realisasi proyek PMA mencapai 112 proyek. Sedangkan untuk tahun 2018 Triwulan I, realisasi jumlah proyek PMA mencapai 102 proyek. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan Triwulan IV di tahun 2017. Kemudian pada triwulan II, realisasi jumlah proyek PMA kembali mengalami penurunan dengan jumlah 80 proyek.



Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2018

Gambar 5.4
Perkembangan realisasi jumlah proyek investasi PMA Tahun 2017-2018
Triwulan II

- 6) Penyerapan tenaga kerja pada PMA selama Tahun 2017 Triwulan I sampai tahun 2018 Triwulan II realisasinya menunjukkan trend perkembangan yang fluktuatif. Pada Triwulan I penyerapan tenaga kerja PMA mencapai 3.218 pekerja yang terdiri dari 3.147 pekerja berasal dari Indonesia dan 71 pekerja asing. Pada Triwulan II penyerapan tenaga kerja PMA mencapai 5.399 pekerja yang terdiri dari 5.326 pekerja berasal dari Indonesia dan 73 pekerja asing. Pada Triwulan III penyerapan tenaga kerja PMA mencapai 562 pekerja yang terdiri dari 536 pekerja berasal dari Indonesia dan 26 pekerja asing. Pada Triwulan VI penyerapan tenaga kerja PMA mencapai 1.366 pekerja yang terdiri dari 1.348 pekerja berasal dari Indonesia dan 18 pekerja asing. Tahun 2018 Triwulan I, penyerapan tenaga kerja PMA mencapai 387 pekerja yang terdiri dari 372 pekerja berasal dari Indonesia dan 15 pekerja asing. Sedangkan di Triwulan II, penyerapan tenaga kerja PMA mencapai 177 pekerja yang terdiri dari 174 pekerja berasal dari Indonesia dan 3 pekerja asing.



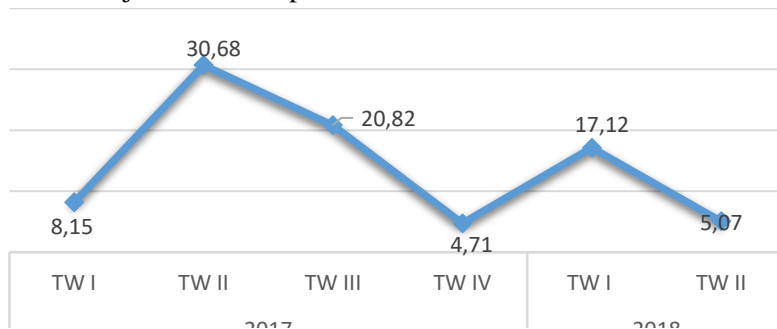
Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2018

Gambar 5.5

Perkembangan realisasi penyerapan tenaga kerja pada kegiatan investasi PMA Tahun 2017-2018 Triwulan II

- 7) Perkembangan realisasi nilai investasi PMDN selama Tahun 2017 Triwulan I sampai tahun 2018 Triwulan II mengalami trend yang fluktuatif. Pada Triwulan I nilai realisasi investasi PMDN mencapai Rp. 8.155.548.890.782,72. Pada Triwulan II nilai realisasi investasi PMDN mencapai Rp. 30.685.527.601.061,50. Selanjutnya pada Triwulan III nilai investasi terealisasi sebesar Rp. 20.820.527.218.875,70. Kemudian pada

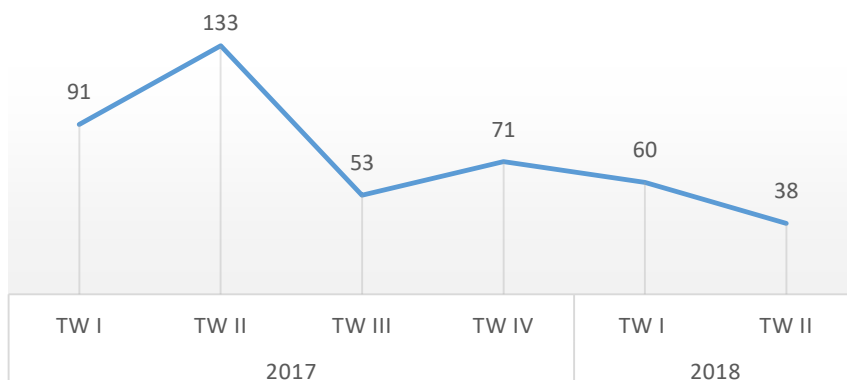
Triwulan IV realisasi investasi PMDN mengalami penurunan sebesar Rp. 4.717.023816.638,00. Sedangkan di tahun 2018 pada Triwulan I, nilai realisasi investasi PMDN mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp Rp 17,134,499,742,020.70. pada triwulan II, nilai realisasi PMDN mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 5,069,033,189,793.75.



Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2018

Gambar 5.6 Perkembangan realisasi investasi PMDN Tahun 2017-2018 Triwulan II (Rp. Triliun)

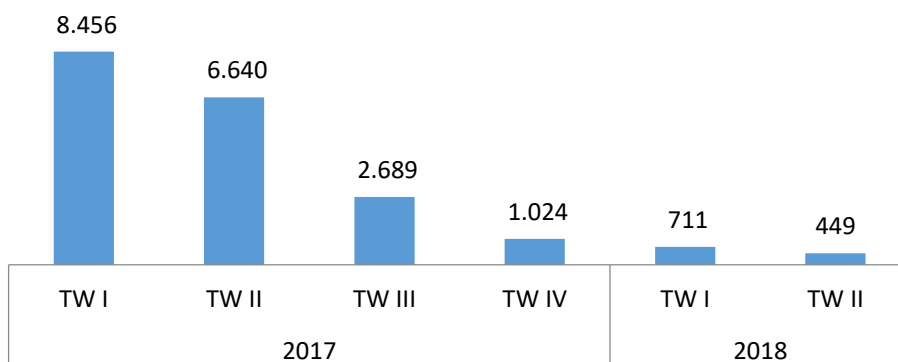
- 8) Realisasi jumlah proyek PMDN selama Tahun 2017 Triwulan I sampai Tahun 2018 Triwulan II perkembangannya cenderung fluktuatif. Pada Triwulan I realisasi jumlah proyek PMDN mencapai 91 proyek. Kemudian pada Triwulan II realisasi jumlah proyek PMDN mencapai 133 proyek. Triwulan III realisasi proyek PMDN mencapai 53 proyek. Pada Triwulan IV realisasi proyek PMDN mencapai 71 proyek. Tahun 2018 pada triwulan I, realisasi jumlah proyek PMDN mencapai 60 proyek. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan realisasi jumlah proyek di tahun 2017 pada Triwulan IV.



Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2018

Gambar 5.7 Perkembangan realisasi jumlah proyek investasi PMDN Tahun 2017-2018 Triwulan II

- 9) Realisasi Penyerapan tenaga kerja pada PMDN selama Tahun 2017 Triwulan I sampai Tahun 2018 Triwulan II menunjukkan trend perkembangan yang cenderung mengalami penurunan. Pada Triwulan I penyerapan tenaga kerja PMDN mencapai 8.456 pekerja yang terdiri dari 8.454 pekerja berasal dari Indonesia dan 2 pekerja asing. Pada Triwulan II penyerapan tenaga kerja PMDN mencapai 6.640 pekerja yang terdiri dari 6.632 pekerja berasal dari Indonesia dan 8 pekerja asing. Pada Triwulan III penyerapan tenaga kerja PMA mencapai 2.689 pekerja berasal dari Indonesia. Pada Triwulan VI penyerapan tenaga kerja PMA mencapai 1.024 pekerja berasal dari Indonesia. Tahun 2018 pada Triwulan I, realisasi penyerapan tenaga kerja PMDN kembali mengalami penurunan hingga mencapai sebesar 711 pekerja yang terdiri dari 710 pekerja berasal dari Indonesia dan 1 pekerja asing. Sedangkan pada Triwulan II, realisasi penyerapan tenaga kerja PMDN mencapai sebesar 449 pekerja yang terdiri dari pekerja berasal dari Indonesia.



Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2017

Gambar 5.8

Perkembangan realisasi penyerapan tenaga kerja pada kegiatan investasi PMA Tahun 2017-2018 Triwulan II

- 10) Berdasarkan sebaran penanaman modal perkembangan realisasi nilai investasi PMA selama Tahun 2017 Triwulan I sampai Tahun 2018 Triwulan II di wilayah Kota Surabaya cenderung fluktuatif. Pada Triwulan I nilai realisasi nilai PMA di 1) Surabaya Barat sebesar Rp.

2.607.588.138,00; 2) Surabaya Timur sebesar Rp. 1.476.643.953.342,00; 3) Surabaya Pusat sebesar Rp. 148.647.642.650,00; 4) Surabaya Selatan sebesar Rp. 173.375.385.711,00; 5) Surabaya Utara sebesar Rp. 235.466.104.802,00. Pada Triwulan II nilai realisasi nilai PMA di 1) Surabaya Barat sebesar Rp. 241,899,807,911.00; 2) Surabaya Timur sebesar Rp. 4,396,332,362,129.79 3) Surabaya Pusat sebesar Rp. 261,931,904,766.00; 4) Surabaya Selatan sebesar Rp. 531,086,262,690.00; 5) Surabaya Utara sebesar Rp. 15,784,277,263,564.70. Pada Triwulan III nilai realisasi nilai PMA di 1) Surabaya Barat sebesar Rp. 1,485,901,856,472.00; 2) Surabaya Timur sebesar Rp. 100,022,612,448.00; 3) Surabaya Pusat sebesar Rp. 1,829,539,338,924.00; 4) Surabaya Selatan sebesar Rp. 811,700,759,496.00; 5) Surabaya Utara sebesar Rp. 1,016,963,497,308.00. Pada Triwulan IV nilai realisasi nilai PMA di 1) Surabaya Barat sebesar Rp. 2,046,674,629,375.00; 2) Surabaya Timur sebesar Rp. 2,762,129,793,250.00; 3) Surabaya Pusat sebesar Rp. 8,436,247,862,545.03; 4) Surabaya Selatan sebesar Rp. 661,496,134,284.89; 5) Surabaya Utara sebesar Rp. 661,496,134,284.89. Di tahun 2018 Triwulan I, nilai realisasi investasi PMA di Surabaya Barat sebesar Rp. 1,100,104,185,823.00; 2) Surabaya Timur sebesar Rp. 369,537,555,199.00; 3) Surabaya Pusat sebesar Rp. 776,272,952,473.00; 4) Surabaya Selatan sebesar Rp. 133,516,715,666.89; 5) Surabaya Utara sebesar Rp. 18,124,843,359.00. Sedangkan pada triwulan II, nilai realisasi investasi PMA di Surabaya Barat sebesar Rp 27,731,250,561.00; 2) Surabaya Timur sebesar Rp. 31,655,682,624.00; 3) Surabaya Pusat sebesar Rp. 548,160,203,637.02; 4) Surabaya Selatan sebesar Rp. 334,597,821,441.89; 5) Surabaya Utara sebesar Rp. 193,222,146,982.01.

Tabel 5.2
Realisasi nilai investasi PMA pada Tahun 2017-Tahun 2018 Triwulan II (Rupiah)

Tahun	Periode	Wilayah				
		Surabaya Barat	Surabaya Timur	Surabaya Pusat	Surabaya Selatan	Surabaya Utara
2017	TW I	2,607,588,138.00	1,476,643,953,342.00	148,647,642,650.00	173,375,385,711.00	235,466,104,802.00
	TW II	241,899,807,911.00	4,396,332,362,129.79	261,931,904,766.00	531,086,262,690.00	15,784,277,263,564.70
	TW III	1,485,901,856,472.00	100,022,612,448.00	1,829,539,338,924.00	811,700,759,496.00	1,016,963,497,308.00
	TW IV	2,046,674,629,375.00	2,762,129,793,250.00	8,436,247,862,545.03	661,496,134,284.89	661,496,134,284.89
2018	TW I	1,100,104,185,823.00	369,537,555,199.00	776,272,952,473.00	133,516,715,666.89	18,124,843,359.00
	TW II	27,731,250,561.00	31,655,682,624.00	548,160,203,637.02	334,597,821,441.89	193,222,146,982.01

Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2018

- 11) Berdasarkan sebaran penanaman modal perkembangan realisasi jumlah proyek investasi PMA selama Tahun 2017 Triwulan II sampai Tahun 2018 Triwulan II di wilayah Kota Surabaya cenderung fluktuatif. Pada Triwulan I realisasi jumlah proyek PMA di 1) Surabaya Barat sebesar 61 proyek; 2) Surabaya Timur sebesar 22 proyek; 3) Surabaya Pusat sebesar 12 proyek; 4) Surabaya Selatan sebesar 25 proyek; 5) Surabaya Utara sebesar 7 proyek. Pada Triwulan II realisasi jumlah proyek PMA di 1) Surabaya Barat sebesar 26 proyek; 2) Surabaya Timur sebesar 37 proyek; 3) Surabaya Pusat sebesar 27 proyek; 4) Surabaya Selatan sebesar 23 proyek; 5) Surabaya Utara sebesar 20 proyek. Pada Triwulan III realisasi jumlah proyek PMA di 1) Surabaya Barat sebesar 53 proyek; 2) Surabaya Timur sebesar 18 proyek; 3) Surabaya Pusat sebesar 27 proyek; 4) Surabaya Selatan sebesar 27 proyek; 5) Surabaya Utara sebesar 131 proyek. Pada Triwulan IV realisasi jumlah proyek PMA di 1) Surabaya Barat sebesar 34 proyek; 2) Surabaya Timur sebesar 34 proyek; 3) Surabaya Pusat sebesar 17 proyek; 4) Surabaya Selatan sebesar 23 proyek; 5) Surabaya Utara sebesar 2 proyek. Di tahun 2018 Triwulan I, realisasi proyek PMA di 1) Surabaya Barat sebesar 24 proyek; 2) Surabaya Timur sebesar Surabaya Timur sebesar 25 proyek; 3) Surabaya Pusat sebesar 18 proyek; 4) Surabaya Selatan sebesar 28 proyek; 5) Surabaya Utara sebesar 7 proyek. Sedangkan pada Triwulan II, realisasi proyek PMA di 1) Surabaya Barat sebesar 25 proyek; 2) Surabaya Timur sebesar Surabaya Timur sebesar 16 proyek; 3) Surabaya Pusat sebesar 13 proyek; 4) Surabaya Selatan sebesar 22 proyek; 5) Surabaya Utara sebesar 3 proyek.

Tabel 5.3

**Sebaran penanaman modal perkembangan realisasi jumlah proyek
investasi PMA tahun 2017-2018 Triwulan II**

Tahun	Wilayah					
	Periode	Surabaya Barat	Surabaya Timur	Surabaya Pusat	Surabaya Selatan	Surabaya Utara
2017	TW I	61	22	12	25	7
	TW II	26	37	27	23	20
	TW III	53	18	27	27	131
	TW IV	34	34	17	23	2
2018	TW I	24	25	18	28	7
	TW II	25	16	13	22	3

Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2018

- 12) Berdasarkan penyerapan tenaga kerja, perkembangan realisasi jumlah tenaga kerja yang terserap dalam investasi PMA selama Tahun 2017 Triwulan II sampai Tahun 2018 Triwulan II di wilayah Kota Surabaya cenderung fluktuatif. Pada Triwulan I realisasi penyerapan tenaga kerja PMA di 1) Surabaya Barat sebesar 1,679 tenaga kerja; 2) Surabaya Timur sebesar 1,099 tenaga kerja; 3) Surabaya Pusat sebesar 300 tenaga kerja; 4) Surabaya Selatan sebesar 85 tenaga kerja; 5) Surabaya Utara sebesar 55 tenaga kerja. Pada Triwulan II realisasi penyerapan tenaga kerja PMA di 1) Surabaya Barat sebesar 2.112 tenaga kerja; 2) Surabaya Timur sebesar 985 tenaga kerja; 3) Surabaya Pusat sebesar 473 tenaga kerja; 4) Surabaya Selatan sebesar 1,975 tenaga kerja; 5) Surabaya Utara sebesar 1,087 tenaga kerja. Pada Triwulan III realisasi penyerapan tenaga kerja PMA di 1) Surabaya Barat sebesar 216 tenaga kerja; 2) Surabaya Timur sebesar 67 tenaga kerja; 3) Surabaya Pusat sebesar 143 tenaga kerja; 4) Surabaya Selatan sebesar 131 tenaga kerja; 5) Surabaya Utara sebesar 5 tenaga kerja. Pada Triwulan IV realisasi penyerapan tenaga kerja PMA di 1) Surabaya Barat sebesar 533 tenaga kerja; 2) Surabaya Timur sebesar 608 tenaga kerja; 3) Surabaya Pusat sebesar 188 tenaga kerja; 4) Surabaya Selatan sebesar 37 tenaga kerja. Tahun 2018 pada Triwulan I, realisasi penyerapan tenaga kerja PMA di 1) Surabaya Barat sebesar 250 tenaga kerja; 2)

Surabaya Timur sebesar 68 tenaga kerja; 3) Surabaya Pusat sebesar 28 tenaga kerja; 4) Surabaya Selatan sebesar 28 tenaga kerja; 5) Surabaya Utara sebesar 13 tenaga kerja. Pada Triwulan II, realisasi penyerapan tenaga kerja PMA di 1) Surabaya Barat sebesar 28 tenaga kerja; 2) Surabaya Timur sebesar 5 tenaga kerja; 3) Surabaya Pusat sebesar 55 tenaga kerja; 4) Surabaya Selatan sebesar 69 tenaga kerja; 5) Surabaya Utara sebesar 7 tenaga kerja.

Tabel 5.4

Perkembangan Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap Dalam Investasi PMA Tahun 2017-2018 Triwulan II

Tahun	Periode	Wilayah				
		Surabaya Barat	Surabaya Timur	Surabaya Pusat	Surabaya Selatan	Surabaya Utara
2017	TW I	1,679	1,099	300	85	55
	TW II	2,112	985	473	1,975	1,087
	TW III	216	67	143	131	5
	TW IV	533	608	188	37	-
2018	TW I	250	68	28	28	13
	TW II	28	5	55	69	7

Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2018

- 13) Berdasarkan sebaran penanaman modal perkembangan realisasi nilai investasi PMDN selama Tahun 2017 Triwulan I sampai Tahun 2018 Triwulan II di wilayah Kota Surabaya cenderung fluktuatif. Pada Triwulan I nilai realisasi nilai PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar Rp. 1,157,255,702,201.00; 2) Surabaya Timur sebesar Rp. 4,470,036,665,679.79; 3) Surabaya Pusat sebesar Rp. 681,087,053,163.00; 4) Surabaya Selatan sebesar Rp. 1,496,330,156,274.23; 5) Surabaya Utara sebesar Rp. 350,839,313,464.70. Pada Triwulan II nilai realisasi nilai PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar Rp. 2,421,899,807,911.00; 2) Surabaya Timur sebesar Rp. 4,396,332,362,129.79 3) Surabaya Pusat sebesar Rp. 2,761,931,904,766.00; 4) Surabaya Selatan sebesar Rp. 5,321,086,262,690.00; 5) Surabaya Utara sebesar Rp. 15,784,277,263,564.70. Pada Triwulan III nilai realisasi nilai PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar Rp. 9,079,952,246,287.00; 2) Surabaya

Timur sebesar Rp. 4,081,598,162,827.79; 3) Surabaya Pusat sebesar Rp. 921,504,204,000.00; 4) Surabaya Selatan sebesar Rp. 4,784,645,003,609.23; 5) Surabaya Utara sebesar Rp. 1,952,827,602,151.70. Pada Triwulan IV nilai realisasi nilai PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar Rp. 1,957,955,546,267.00; 2) Surabaya Timur sebesar Rp. 555,919,063,402.79; 3) Surabaya Pusat sebesar Rp. 2,231,845,690.00; 4) Surabaya Selatan sebesar Rp. 831,882,933,078.00; 5) Surabaya Utara sebesar Rp. 12,045,390,426,809.00. Di Tahun 2018 Pada Triwulan I nilai realisasi nilai PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar Rp. 1,914,545,356,142.00; 2) Surabaya Timur sebesar Rp. 753,057,829,749.79; 3) Surabaya Pusat sebesar Rp. 834,682,246,000.00; 4) Surabaya Selatan sebesar Rp. 2,115,629,875,063.96; 5) Surabaya Utara sebesar Rp. 11,516,584,435,065.00. Pada Triwulan II nilai realisasi nilai PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar Rp. 2,303,571,874,574.00; 2) Surabaya Timur sebesar Rp. 1,216,904,363,789.79; 3) Surabaya Pusat sebesar Rp. 62,549,095,690.00; 4) Surabaya Selatan sebesar Rp. 234,798,415,593.96; 5) Surabaya Utara sebesar Rp. 1,251,209,440,146.00.

Tabel 5.5

Realisasi nilai investasi PMDN pada Tahun 2017-2018 Triwulan II (Rupiah)

Tahun	Periode	Wilayah				
		Surabaya Barat	Surabaya Timur	Surabaya Pusat	Surabaya Selatan	Surabaya Utara
2017	TW I	1,157,255,702,201.00	4,470,036,665,679.79	681,087,053,163.00	1,496,330,156,274.23	350,839,313,464.70
	TW II	2,421,899,807,911.00	4,396,332,362,129.79	2,761,931,904,766.00	5,321,086,262,690.00	15,784,277,263,564.70
	TW III	9,079,952,246,287.00	4,081,598,162,827.79	921,504,204,000.00	4,784,645,003,609.23	1,952,827,602,151.70
	TW IV	1,957,955,546,267.00	555,919,063,402.79	2,231,845,690.00	831,882,933,078.00	12,045,390,426,809.00
2018	TW I	1,914,545,356,142.00	753,057,829,749.79	834,682,246,000.00	2,115,629,875,063.96	11,516,584,435,065.00
	TW II	2,303,571,874,574.00	1,216,904,363,789.79	62,549,095,690.00	234,798,415,593.96	1,251,209,440,146.00

Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2018

14) Berdasarkan sebaran penanaman modal perkembangan realisasi jumlah proyek investasi PMDN selama Tahun 2017 Triwulan I sampai Tahun 2018 Triwulan II di wilayah Kota Surabaya cenderung fluktuatif. Pada Triwulan I realisasi jumlah proyek PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar 15 proyek ; 2) Surabaya Timur sebesar 33 proyek; 3) Surabaya Pusat sebesar 12 proyek; 4) Surabaya Selatan sebesar 23 proyek; 5) Surabaya

Utara sebesar 7 proyek. Pada Triwulan II realisasi jumlah proyek PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar 26 proyek ; 2) Surabaya Timur sebesar 37 proyek; 3) Surabaya Pusat sebesar 27 proyek; 4) Surabaya Selatan sebesar 23 proyek; 5) Surabaya Utara sebesar 20 proyek. Pada Triwulan III realisasi jumlah proyek PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar 14 proyek ; 2) Surabaya Timur sebesar 10 proyek; 3) Surabaya Pusat sebesar 6 proyek; 4) Surabaya Selatan sebesar 14 proyek; 5) Surabaya Utara sebesar 9 proyek. Pada Triwulan IV realisasi jumlah proyek PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar 15 proyek ; 2) Surabaya Timur sebesar 5 proyek; 3) Surabaya Pusat sebesar 10 proyek; 4) Surabaya Selatan sebesar 23 proyek; 5) Surabaya Utara sebesar 3 proyek. Di Tahun 2018 Pada Triwulan I, realisasi jumlah proyek PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar 17 proyek ; 2) Surabaya Timur sebesar 11 proyek; 3) Surabaya Pusat sebesar 5 proyek; 4) Surabaya Selatan sebesar 19 proyek; 5) Surabaya Utara sebesar 8 proyek. Pada Triwulan II, realisasi jumlah proyek PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar 14 proyek ; 2) Surabaya Timur sebesar 6 proyek; 3) Surabaya Pusat sebesar 2 proyek; 4) Surabaya Selatan sebesar 12 proyek; 5) Surabaya Utara sebesar 4 proyek

Tabel 5.6

Sebaran Penanaman Modal Perkembangan Realisasi Jumlah Proyek Investasi PMDN Tahun 2017-2018 Triwulan II

Tahun	Periode	Wilayah				
		Surabaya Barat	Surabaya Timur	Surabaya Pusat	Surabaya Selatan	Surabaya Utara
2017	TW I	15	33	13	23	7
	TW II	26	37	27	23	20
	TW III	14	10	6	14	9
	TW IV	15	5	5	10	3
2018	TW I	17	11	5	19	8
	TW II	14	6	2	12	4

Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2018

- 15) Berdasarkan penyerapan tenaga kerja, perkembangan realisasi jumlah tenaga kerja yang terserap dalam investasi PMDN selama Tahun 2017 Triwulan I sampai Tahun 2018 Triwulan II di wilayah Kota Surabaya

cenderung fluktuatif. Pada Triwulan I realisasi penyerapan tenaga kerja PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar 1.017 tenaga kerja; 2) Surabaya Timur sebesar 4.781 tenaga kerja; 3) Surabaya Pusat sebesar 438 tenaga kerja; 4) Surabaya Selatan sebesar 1.389 tenaga kerja; 5) Surabaya Utara sebesar 831 tenaga kerja. Pada Triwulan II realisasi penyerapan tenaga kerja PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar 2.116 tenaga kerja; 2) Surabaya Timur sebesar 985 tenaga kerja; 3) Surabaya Pusat sebesar 473 tenaga kerja; 4) Surabaya Selatan sebesar 1.979 tenaga kerja; 5) Surabaya Utara sebesar 1.087 tenaga kerja. Pada Triwulan III realisasi penyerapan tenaga kerja PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar 25 tenaga kerja; 2) Surabaya Timur sebesar 444 tenaga kerja; 3) Surabaya Selatan sebesar 128 tenaga kerja. Pada Triwulan IV realisasi penyerapan tenaga kerja PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar 25 tenaga kerja; 2) Surabaya Selatan sebesar 196 tenaga kerja. Di Tahun 2018 pada Triwulan I, realisasi penyerapan tenaga kerja PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar 115 tenaga kerja; 2) Surabaya Timur sebesar 26 tenaga kerja; 3) Surabaya Pusat sebesar 56 tenaga kerja; 4) Surabaya Selatan sebesar 486 tenaga kerja; 5) Surabaya Utara sebesar 28 tenaga kerja. Pada Triwulan II, realisasi penyerapan tenaga kerja PMDN di 1) Surabaya Barat sebesar 38 tenaga kerja; 2) Surabaya Timur sebesar 404 tenaga kerja; dan Surabaya Selatan sebesar 7 tenaga kerja.

Tabel 5.7

Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja pada investasi PMDN

Tahun	Periode	Wilayah				
		Surabaya Barat	Surabaya Timur	Surabaya Pusat	Surabaya Selatan	Surabaya Utara
2017	TW I	1,017	4,781	438	1,389	831
	TW II	2,116	985	473	1,979	1,087
	TW III	2339	444	0	128	0
	TW IV	25	0	0	196	0
2018	TW I	115	26	56	486	28
	TW II	38	404	0	7	0

Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2018

BAB XI

POTENSI REALISASI INVESTASI

11.1. Realisasi investasi Kota Surabaya

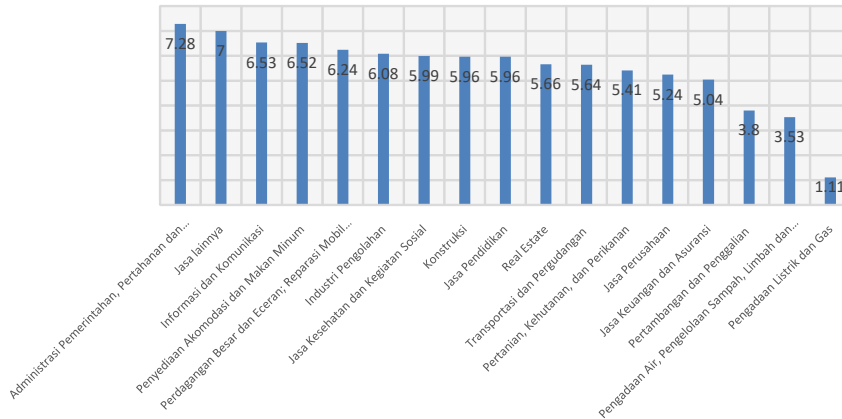
- 1) Realisasi investasi selama kurun waktu 2011—2017 relatif berfluktuatif dengan kecenderungan yang meningkat. Peningkatan realisasi investasi ini, secara umum masih bisa lebih ditingkatkan lagi seiring dengan stabilitas kondisi perekonomian di Kota Surabaya ditengah lesunya perekonomian nasional dan global. Realisasi Investasi di Kota Surabaya cukup baik dimana, realisasi selalu melebihi target yang telah di tetapkan. Pada tahun 2015 besarnya target penanaman modal adalah sebesar Rp. 19.810.000.000.000 dan tahun 2016 sebesar Rp. 20.998.600.000.000, namun demikian realisasi tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 32.065.531.546.015 dan tahun 2016 sebesar Rp. 39.687.765.731.008. Selanjutnya untuk tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar Rp. 41.672.154.017.558 dan terealisasi sebesar Rp. 45.673.985.430.030, sehingga capaiannya adalah sebesar 109,60%.

Tabel 5.8**Rasio Perbandingan Target dan Realisasi Penanaman Modal**

RASIO PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALIASI			
TAHUN	PENANAMAN MODAL		CAPAIAN %
	Target	Realiasi	Target -> Realisasi
	Rp	Rp	Rp
2011	13.284.000.000.000	24.169.493.406.418	181,94%
2012	14.760.000.000.000	32.142.361.788.134	217,77%
2013	16.400.000.000.000	22.129.765.567.753	134,94%
2014	18.010.000.000.000	35.275.422.119.578	195,87%
2015	19.810.000.000.000	32.065.531.546.015	161,87%
2016	20.998.600.000.000	39.687.765.731.008	189,00%
2017*	41.672.154.017.558	45.673.985.430.030	109,60%

*Sumber: Bappeko. 2018 * Data sementara*

- 2) Potensi realisasi investasi bisa diukur salah satunya dari pertumbuhan sektoral PDRB dan peranan sektoral terhadap total PDRB. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Surabaya (2018) di ketahui bahwa sektor yang mempunyai pertumbuhan cukup tinggi pada tahun 2017 yaitu antara lain Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan wajib sosial (7,28%), diikuti oleh sektor jasa lainnya (7,00%), informasi dan komunikasi (6,53%) dan penyediaan akomodasi dan makanan minuman (6,52%) serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,24%) seperti terlihat pada gambar 5.9 dibawah ini.



Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2018

Gambar 5.9

Pertumbuhan Ekonomi Per Kategori Lapangan Usaha Kota Surabaya Tahun 2017

Berdasarkan 17 (tujuh belas) sektor yang ada didalam PDRB, total PDRB ADHK selama tahun 2017 sebesar Rp 364.619.859,76 juta. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan nilai PDRB ADHK tertinggi di Kota Surabaya. PDRB ADHK di sektor ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Realisasi nilai ADHK sektor perdagangan di Tahun 2017 sebesar Rp 103,525,069.29 Sektor dengan kontribusi PDRB ADHK tertinggi kedua adalah sektor industri pengolahan yang juga mengalami kenaikan nilai PDRB ADHK yaitu mencapai Rp 70,632,660.16.

Tabel 5.9

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2016-2017 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha		2016		2017	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	570,789.40	0.17%	601,672.11	0.17%
B	Pertambangan dan Penggalian	20,028.10	0.01%	20,788.68	0.01%
C	Industri Pengolahan	66,582,825.60	19.38%	70,632,660.16	19.37%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,514,658.20	0.44%	1,531,529.02	0.42%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	528322.4	0.15%	546,974.65	0.15%
F	Konstruksi	33,864,739.10	9.85%	35,881,537.22	9.84%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	97,443,597.60	28.36%	103,525,069.29	28.39%
H	Transportasi dan Pergudangan	16,569,183.70	4.82%	17,503,188.89	4.80%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49,881,297.70	14.52%	53,132,471.27	14.57%
J	Informasi dan Komunikasi	22,421,127.20	6.52%	23,884,559.84	6.55%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17,184,785.50	5.00%	18,050,163.54	4.95%
L	Real Estate	9,145,630.80	2.66%	9,663,218.86	2.65%
M,N	Jasa Perusahaan	7,761,412.10	2.26%	8,168,154.81	2.24%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,384,611.60	1.28%	4,703,982.01	1.29%
P	Jasa Pendidikan	8,052,649.00	2.34%	8,532,804.58	2.34%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,649,121.80	0.77%	2,807,803.21	0.77%
R,S, T,U	Jasa lainnya	5,077,815.10	1.48%	5,433,281.55	1.49%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		343,652,595.00	100.00%	364,619,859.76	100.00%

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah

*Catatan : *) data sangat sementara*

Berdasarkan ADHK, Pada tahun 2016 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp 451,486,791.00 juta meningkat menjadi sebesar Rp 503,824,868.16 juta di tahun 2017. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2017 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp 139.211.011,44 juta. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 124.579.579,50 Juta. Sektor tertinggi selanjutnya yaitu sektor industri pengolahan dengan nilai PDRB sebesar Rp 85.21.283,80 juta di tahun 2016 dan meningkat menjadi Rp 95.058.641,41 juta di tahun 2017. Sama seperti

halnya kedua sektor perdagangan dan industri pengolahan, sektor ekonomi lainnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada sektor pengadaan listrik dan gas. Nilai PDRB di sektor tersebut mengalami penurunan yang tidak signifikan. Realisasi nilai PDRB sektor pengadaan listrik dan gas di tahun 2016 sebesar Rp 2.144.720,80 juta dan menurun menjadi Rp 2.138.523,44 juta di tahun 2017.

Tabel 5.10

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2017 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		2015		2016*	
		(Juta (Rp))	(%)	(Juta (Rp))	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	808,811.90	0.18%	907,240.48	0.18%
B	Pertambangan dan Penggalian	29,145.20	0.01%	32,761.46	0.01%
C	Industri Pengolahan	85,213,283.80	18.87%	95,058,641.41	18.87%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,144,720.80	0.48%	2,138,523.44	0.42%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	678586,7	0.15%	756,033.73	0.15%
F	Konstruksi	45,103,247.10	9.99%	50,301,444.39	9.98%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	124,579,579.50	27.59%	139,211,011.44	27.63%
H	Transportasi dan Pergudangan	23,647,508.70	5.24%	26,360,376.17	5.23%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70,854,863.30	15.69%	79,333,139.76	15.75%
J	Informasi dan Komunikasi	24,457,105.40	5.42%	27,418,823.39	5.44%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24,105,835.20	5.34%	26,813,996.41	5.32%
L	Real Estate	11,614,141.30	2.57%	12,852,573.46	2.55%
M,N	Jasa Perusahaan	10,926,169.80	2.42%	12,197,344.23	2.42%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,221,289.50	1.38%	7,005,912.59	1.39%
P	Jasa Pendidikan	11,036,182.80	2.44%	12,096,539.73	2.40%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,389,778.00	0.75%	3,780,168.66	0.75%
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,676,541.90	1.48%	7,560,337.33	1.50%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		451,486,791.00	100%	503,824,868.16	100%

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah,

*Catatan : *) data sangat sementara*

Berdasarkan jumlah realisasi nilai investasi baik PMA dan PMDN sektor industri merupakan jumlah realisasi nilai investasi terbanyak selama tahun 2017. sedangkan di tahun 2018 Triwulan I sektor tersier (sektor transportasi, Gudang dan Komunikasi merupakan sektor dengan jumlah

realisasi investasi terbanyak. Sedangkan untuk triwulan II, sektor industri merupakan sektor yang mempunyai jumlah nilai investasi terbanyak.

Tabel 5.11
Realisasi Nilai Investasi per Sektor

No	Sektor	Nilai Investasi (Rp)			Total
		2017	2018 TW I	2018 TW II	
I	SEKTOR PRIMER				
1	Tanaman pangan dan perkebunan	-	-	-	-
2	Perternakan	-	-	-	-
3	Kehutanan	-	-	-	-
4	Perikanan	11.921.607.453,89	-	-	-
5	Pertambangan	-	-	-	-
II	SEKTOR SEKUNDER	-	-	-	-
1	Industri Makan	7.390.731.694.101,08	135.447.777.437,00	111.421.639.964,00	246.869.417.401,00
2	Industri Tekstil	168.434.082.800,00	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	274.901.070.940,97	-	-	-
4	Industri Kayu	612.274.199.042,63	-	3.550.000,00	3.550.000,00
5	Industri Kertas dan Percetakan	2.490.993.812.384,00	440.837.482.022,00	-	440.837.482.022,00
6	Industri Kimia dan Farmasi	3.707.132.749.729,12	122.257.935.889,00	32.147.471.677,00	154.405.407.566,00
7	Industri Karet dan Plastik	1.667.959.515.049,00	-	-	-
8	Industri Mineral non logam	111.544.000.000,00	100.498.733.935,00	13.500.000.000,00	113.998.733.935,00
9	Industri Logam, mesin dan elektronika	9.023.142.965.425,09	2.236.227.343.892,79	1.236.587.746.756,79	3.472.815.090.649,58
10	Industri Instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam	18.000.000.000,00	-	-	-
11	Industri Kendaraan bermotor dan alat transportasi Lainnya	565.223.707.408,00	16.766.104.406,00	3.562.436,94	16.769.666.842,94
12	Industri lainnya	2.900.284.689.689,59	61.699.595.600,00	207.008.730.325,00	268.708.325.925,00
III	SEKTOR TERSIER	-	-	-	-
1	Listrik, Gas dan Air	244.565.514.957,00	144.693.051.570,00	169.950.905.331,00	314.643.956.901,00
2	Konstruksi	9.201.978.565.206,89	-	-	-
3	Perdagangan dan Reparasi	3.999.860.959.914,21	373.565.830.937,89	171.280.698.531,90	544.846.529.469,79
4	Hotel dan Restoran	4.437.781.570.073,54	782.706.697.054,96	930.248.703.063,96	1.712.955.400.118,92
5	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	62.934.617.297.816,00	12.119.853.700.619,00	363.980.922.359,00	12.483.834.622.978,00
6	Perumahan, Kawasan industri dan perkantoran	7.321.744.183.095,75	2.259.777.198.849,00	589.879.309.439,25	2.849.656.508.288,25
7	Jasa Lainnya	4.302.984.569.229,12	737.724.542.329,00	1.353.268.424.610,02	2.090.992.966.939,02

Sumber : DPM-PTSP Kota Surabaya, 2018

Berdasarkan jumlah proyek selama tahun 2017 menunjukkan trend yang cenderung fluktuatif setiap sektor pada realisasi investasi PMA dan PMDN namun tetap jumlah proyek terbanyak berasal dari sektor industri dan Perdagangan dan Reparasi. Sedangkan di tahun 2018 pada Triwulan I dan II, jumlah proyek terbanyak berasal dari sektor industri serta sektor hotel dan restoran.

Tabel 5.12
Jumlah Proyek Investasi per Sektor

No	Sektor	Tahun 2017 Periode				Total	Tahun 2018		
		TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	Total
I	SEKTOR PRIMER	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Tanaman pangan dan perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Perternakan	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kehutanan	0	0	1	0	1	0	0	0
4	Perikanan	2	0	0	0	2	0	0	0
5	Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0	0
II	SEKTOR SEKUNDER	0	17	7	0	24	0	0	0
1	Industri Makan	10	3	0	5	18	8	3	11
2	Industri Tekstil	1	4	1	0	6	0	0	0
3	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2	16	1	0	19	0	0	0
4	Industri Kayu	2	3	3	3	11	1	1	2
5	Industri Kertas dan Percetakan	4	9	4	1	18	2	0	2
6	Industri Kimia dan Farmasi	15	12	2	4	33	7	3	10
7	Industri Karet dan Plastik	0	0	0	1	1	2	0	2
8	Industri Mineral non logam	2	27	14	2	45	3	1	4
9	Industri Logam, mesin dan elektronika	5	2	0	16	23	19	12	31
10	Industri Instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam	0	2	2	1	5	0	0	0
11	Industri Kendaraan bermotor dan alat transportasi Lainnya	5	12	8	2	27	1	1	2
12	Industri lainnya	20	0	0	3	23	3	6	9
III	SEKTOR TERSIER	0	7	3	0	10			0
1	Listrik, Gas dan Air	7	8	3	3	21	0	3	3
2	Konstruksi	1	126	57	0	184	4	0	4
3	Perdagangan dan Reparasi	84	40	18	44	186	0	18	18
4	Hotel dan Restoran	19	28	19	24	90	35	21	56
5	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	26	21	10	12	69	26	10	36
6	Perumahan, Kawasan industri dan perkantoran	0	50	31	6	87	17	6	23
7	Jasa Lainnya	13	387	184	0	605	21	30	51

Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2017 di setiap sektor pada realisasi investasi PMA dan PMDN cenderung fluktuatif akan tetapi pada sektor Perdagangan dan Reparasi serta Transportasi Gudang dan Komunikasi, cenderung mengalami kenaikan dan mendominasi setiap sektor. Di tahun 2018 Triwulan I, sektor Perdagangan dan reparasi

merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan dengan sektor lainnya. Sedangkan pada triwulan II, sektor hotel dan restoran merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbanyak dibanding sektor lain.

Tabel 5.13 Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja

No	Sektor	Tahun 2017 Triwulan				TOTAL	Tahun 2018		Total
		I	II	III	IV		TW I	TW II	
I	SEKTOR PRIMER								
1	Tanaman pangan dan perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Perternakan	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kehutanan	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Perikanan	6	0	6	0	12	0	0	0
5	Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0	0
II	SEKTOR SEKUNDER	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Industri Makan	1,164	941	0	0	942,164	30	0	30
2	Industri Tekstil	410	10	0	10	430	0	0	0
3	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	71	217	0	0	288	0	0	0
4	Industri Kayu	0	477	0	0	477	3	0	3
5	Industri Kertas dan Percetakan	66	1,516	8	40	115,516	10	0	10
6	Industri Kimia dan Farmasi	1,373	88	63	0	152,373	27	44	71
7	Industri Karet dan Plastik	0	300	0	38	338	6	0	6
8	Industri Mineral non logam	0	0	0	0	0	13	0	13
9	Industri Logam, mesin dan elektronika	48	2,511	289	0	339,511	79	0	79
10	Industri Instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam	0	36	0	25	61	0	0	0
11	Industri Kendaraan bermotor dan alat transportasi Lainnya	375	267	0	0	642	5	0	5
12	Industri lainnya	5,189	451	115	0	571,189	13	5	18
III	SEKTOR TERSIER	0	0	0	9	9	0	0	0
1	Listrik, Gas dan Air	245	213	6	0	464	14	0	14
2	Konstruksi	0	154	0	0	154	0	0	0
3	Perdagangan dan Reparasi	1,386	891	196	7	1095,386	125	35	160
4	Hotel dan Restoran	133	1,072	279	0	413,072	90	404	494
5	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	927	1,933	2,09	210	1141,023	69	11	80
6	Perumahan, Kawasan industri dan perkantoran	0	482	39	334	855	37	9	46
7	Jasa Lainnya	281	480	160	34	955	85	119	204

Potensi realisasi investasi berasal dari sektor Industri dan Perdagangan dan Reparasi; serta hotel dan restoran. Potensi realisasi didasarkan pada realisasi jumlah proyek, jumlah penyerapan tenaga kerja dan besaran nilai investasi PMA dan PMDN pada sektor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim,. 2016.Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota se-JAWA TIMUR periode 2016, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Surabaya
- Arsyad, Lincolin, 2002. Pengantar Perencanaan Ekonomi Daerah (edisi kedua). Yogyakarta : BPFE
- _____. 2015. Ekonomi Pembangunan, (edisi ke V), STIE YKPN, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Erlangga, Jakarta
- _____, 2013. Ekonomika Pembangunan. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono, 2016. Ekonomi Pembangunan. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Tarigan, Robinson, 2007. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi (edisi revisi), Bumi Aksara, Jakarta
- _____, 2013. Perencanaan Pembangunan Wilayah (edisi revisi), Bumi Aksara, Jakarta
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (edisi Ke VII) Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sukirno, S. 2010. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Kencana, Jakarta.
- Mankiw, N.G. 2007. Makroekonomi. Edisi Keenam. Fitria Liza dan Imam Nurmawan (penerjemah). Erlangga, Jakarta.
- Jhingan, M.L. 2010. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, di akses 12 Mei 2018.

Anonim, 1999,*Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*,Penerbit Kuraiko Pratama,Bandung.

,2013,*Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*,Badan Pusat Statistik Daerah Tingkat I Jawa Timur,Surabaya.

,2014,*Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*,Badan Pusat Statistik Daerah Tingkat I Jawa Timur,Surabaya.

Basri, 1995, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI (Distorsing,Peluang dan Kendala)*,Penerbit Erlangga,Jakarta.

Dasril,Henry & Hessel,2004,*Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*,Penerbit YPAPI,Yogyakarta

Elmi,Bchrul,2002,*Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*.Penerbit Universitas Indonesia (UI Press),Jakarta

Ibnu Syamsi,1993, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara* ,cetakan kedua, Penerbit PT.Bina AksaramJakarta.

Khusaini,2006,*Ekonomi Publik,Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*,Penerbit BPFE UNIBRAW,Malang.

Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta : Penerbit Erlangga

Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta
Permendagri, No 27 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

Permendagri, No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Saragih,Panglima,2003,*Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*,Jakarta;Penerbit Ghalia Indonesia

Stat. Daniel dan Inge Hovlan, 2012, [http://Subliyanto, Wordpress, com](http://Subliyanto.wordpress.com/2012/12/13/analisis-swot)
/2012/12/13 /analisis-swot

Syafrizal, 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional
Wilayah Wilayah Indonesia Bagian Barat. Prisma LP3ES, 3,27-38.

Syafrizal, 2008. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Baduouse Media.

Tarigan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta:
Bumi Aksara.

Todaro, Michael. 2000. Pembangunan Ekonomi. Jakarta. Bumi Aksara